

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang

- Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2022.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 231/PMK.05/2022.
 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas KMK 620/KM.6/2015.
 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas KMK 295/KMK.6/2019.
 22. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK 107 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

*Profil dan Kebijakan Teknis
PPATK*

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Visi, Misi, dan Tujuan yang akan dicapai PPATK dituangkan dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2020 s.d. 2024, sebagai berikut:

1

Visi PPATK

Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2

Misi PPATK

- a. Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- b. Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- d. Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

3

Tujuan

Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

4

Sasaran Strategis PPATK

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Sasaran Strategis PPATK selanjutnya akan dijelaskan ke dalam Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan Sasaran Kegiatan yaitu:
 - a. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - b. Meningkatnya kualitas hasil riset dan pengembangan PPATK.

2. Penguatan regulasi serta meningkatnya efektivitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya pemenuhan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - b. Meningkatnya kualitas layanan hukum PPATK.
3. Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas data pelaporan dari pihak pelapor.
 - b. Meningkatnya efektivitas pengawasan kepatuhan pihak pelapor.
4. Meningkatnya kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas Hasil Analisis PPATK.
 - b. Meningkatnya kualitas Hasil Pemeriksaan PPATK.
 - c. Meningkatnya efektivitas diseminasi produk intelijen PPATK dan pemberian dukungan penanganan perkara.
5. Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya efektivitas kerja sama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - b. Meningkatnya kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).
6. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya efektivitas layanan informasi publik PPATK.
 - b. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
 - c. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK.
7. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK.
 - b. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi PPATK.

8. Meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen internal PPATK.
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan keuangan PPATK.
 - c. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK.
 - d. Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dan ketatalaksanaan PPATK.
9. Meningkatnya peran APIP dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK.
 - b. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK.

Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPATK yang merupakan lembaga pemerintah dengan kode Bagian Anggaran (BA) 078 dan memiliki dua Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diterima. Satuan Kerja di PPATK terdiri dari Satuan Kerja Kantor Pusat PPATK (Satker 453374) dan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Satker 417654).

PPATK mengimplementasikan aplikasi SAKTI dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sejak 1 Januari 2019. Aplikasi SAKTI digunakan di PPATK pada Satker 417654 dan Satker 453374 untuk melakukan pencatatan secara transaksional berbasis akrual berdasarkan dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan. Periode Akuntansi pada aplikasi SAKTI terdiri dari 12 periode normal (Januari-Desember), periode *unaudited*, dan periode *audited*.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

PPATK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kedua basis akuntansi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar pengukuran yang diterapkan PPATK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian laporan keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang digunakan oleh PPATK. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PPATK diuraikan, sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (KUN) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- e. Pendapatan-LRA di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada PPATK, yaitu:
 - 1) Pendapatan Sewa Lahan, Gedung dan Bangunan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui secara proporsional oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
 - 2) Pendapatan Denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, yaitu pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - 3) Pendapatan PNBK-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban-beban yang ada).
- d. Pendapatan dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- e. Pendapatan-LO di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- f. Pendapatan PNBK-LO diukur dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di KUN.
 - 2) Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerja sama dalam rangka perikatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

Aset

5. Aset

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh PPATK sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- c. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

1) Aset Lancar

- a) Aset Lancar diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b) Aset Lancar terdiri dari kas atau setara kas, belanja dibayar di muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, piutang, dan persediaan.
- c) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dijelaskan di neraca dengan menggunakan nilai nominal rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dijelaskan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- d) Setara Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- e) Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang akan diterima setelah tanggal pelaporan.
- f) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- g) Piutang dijelaskan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- h) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- i) Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menetapkan bahwa mulai tahun 2021 seluruh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk menerapkan metode pencatatan *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*. Berdasarkan metode ini, barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

2) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

- a) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu, tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.
- b) Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, sehingga jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi

Beban Dibayar di
Muka/Uang Muka Belanja

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

- c) Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, tetapi pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.
- d) Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih

3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 207/PMK.06/2019 tentang
- c) Penggolongan Kualitas Piutang dijelaskan dalam Tabel 5.

Tabel 5
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.		0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	

Aset Tetap

4) Aset Tetap

- a) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- b) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - i. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama

- dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- ii. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- iii. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d) Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan, antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- e) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

5) Penyusutan Aset Tetap

- a) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - i. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan.
 - ii. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
 - iii. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah.
 - iv. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa manfaat.
- c) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- e) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat dijelaskan dalam Tabel 6.

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	1 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

6) Piutang Jangka Panjang

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- b) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c) TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- d) TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

7) Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud dijelaskan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 81/KM.6/2018.
- d) Aset Tak Berwujud pada PPATK berupa *software* dan memiliki masa manfaat terbatas hingga empat tahun.
- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Tuntutan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 231/PMK.05/2022, disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum kepada pemerintah, maka perlakuan akuntansi atas tuntutan hukum kepada pemerintah yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagai berikut:

1. Pencatatan Kewajiban

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan
- c. Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

2. Pencatatan Aset Tetap

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 - i. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - ii. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat jika SK penghapusan belum terbit.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak

dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, tetapi belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat; dan

- c. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Induk Nomor SP DIPA-078.01-0/2024 tanggal 24 November 2023, pagu anggaran PPATK pada awal tahun anggaran 2024 sebesar Rp243.769.626.000.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/MK.02/2024 tanggal 29 Desember 2023 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, PPATK telah melakukan *automatic adjustment* (AA) belanja sebesar Rp18.163.531.000. Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2024 tanggal 23 Juli 2024 Hal Penyampaian Tindak Lanjut Atas Usulan Relaksasi Automatic Adjustment PPATK TA 2024 telah dilakukan pembukaan AA.

Rincian pagu anggaran awal PPATK pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. DIPA Satker 453374 Nomor SP DIPA-078.01.1.453374/2024 pada 24 November 2023 sebesar Rp215.695.322.000.
2. DIPA Satker 417654 Nomor SP DIPA-078.01.2.417654/2024 pada 28 November 2023 sebesar Rp28.074.304.000.

Rincian DIPA PPATK awal dan setelah revisi tahun 2024 dijelaskan pada tabel 7.

Tabel 7
DIPA PPATK Tahun 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Awal	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan			
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	225.173.000	225.173.000
	Jumlah Pendapatan	225.173.000	225.173.000
Belanja			
1	Belanja Pegawai	140.368.909.000	177.201.534.000
2	Belanja Barang	98.576.197.000	87.924.717.000
3	Belanja Modal	4.824.520.000	2.081.120.000
	Jumlah Belanja	243.769.626.000	267.207.371.000

DIPA PPAK Berdasarkan Program Tahun 2024 dijelaskan dalam Tabel 8.

Tabel 8
DIPA PPAK Berdasarkan Program Tahun 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Anggaran Setelah Revisi
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	61.877.735.000	52.182.667.000
WA	Program Dukungan Manajemen	181.891.891.000	215.024.704.000
	Jumlah Belanja	243.769.626.000	267.207.371.000

Realisasi Pendapatan
Rp1.428.909.261

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.428.909.261 dan Rp1.691.517.303 Keseluruhan Pendapatan PPAK merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dijelaskan dalam Tabel 9.

Tabel 9
Rincian Realisasi Pendapatan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024		
		Estimasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
1.	Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	225.173.000	1.428.909.261	634,58%
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	91.565.346	-
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	3.784.000	-
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.973.000	88.810.000	444,65%
	d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	-	114.800.000	-
	e. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	205.200.000	332.880.000	162,22%
	f. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	5	-
	g. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	13.273.983	-
	h. Pendapatan Denda Lainnya	-	747.975.000	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	12.931.366	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	22.889.561	-
	Jumlah	225.173.000	1.428.909.261	634,58%

PNBP PPAK Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.428.909.261, terdiri dari:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.565.346 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan yang seluruhnya berasal dari Satker 453374.

B.1. Pendapatan (lanjutan)

2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp3.784.000 atas hasil lelang BMN yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan yang seluruhnya berasal dari Satker 417654.
3. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp88.810.000 atas sewa lahan Koperasi Juanda Tiga Lima, Bank Mandiri dan Bank BRI yang seluruhnya berasal dari Satker 453374.
4. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp114.800.000 berupa pendapatan dari penggunaan asrama di satker 417654.
5. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp332.880.000 merupakan pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pendidikan terkait TPPU dan TPPT di satker 417654.
6. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp5 di satker 453374.
7. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp13.273.983 yang berasal dari satker 453374.
8. Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp747.975.000 merupakan denda yang dikenakan kepada pihak pelapor dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan yang dipungut di satker 453374.
9. Penerimaan Kembali Belanja pegawai TAYL sebesar Rp12.931.366 merupakan pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan di tahun 2023 yang berasal dari Satker 453374 sebesar Rp12.812.366 dan Satker 417654 sebesar Rp119.000.
10. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp22.889.561 merupakan pengembalian belanja barang atas temuan BPK yang menjadi Piutang di Laporan Keuangan tahun 2023 yang seluruhnya berasal dari Satker 453374.

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 10.

B.1. Pendapatan (lanjutan)

Tabel 10
Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
1.	Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.428.909.261	1.691.517.303	(262.608.042)	(15,52)
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	91.565.346	930.098.969	(838.533.623)	(90,16)
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.784.000	58.397.998	(54.613.998)	(93,52)
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	88.810.000	21.517.000	67.293.000	312,74
	d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	114.800.000	72.000.000	42.800.000	59,44
	e. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	332.880.000	288.800.000	44.080.000	15,26
	f. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	5	5.360.020	(5.360.015)	(100,00)
	g. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	13.273.983	6.479.455	6.794.528	104,86
	h. Pendapatan Denda Lainnya	747.975.000	-	747.975.000	100,00
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	12.931.366	266.048.456	(253.117.090)	(95,14)
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	22.889.561	42.815.405	(19.925.844)	(46,54)
	Jumlah	1.428.909.261	1.691.517.303	(262.608.042)	(15,52)

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (15,52%) dibandingkan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 yang disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Penurunan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp838.533.623 atau (90,16%) karena Sebagian besar barang yang sudah tidak digunakan telah dilelang di tahun 2023.
2. Penurunan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp54.613.998 atau (93,52%) karena akun ini tidak lagi digunakan di tahun 2024.
3. Penurunan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp5.360.015 atau (100,00%) karena ganti rugi pegawai yang bersangkutan telah lunas.
4. Penurunan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp253.117.090 atau (95,14%) karena berkurangnya pengembalian.
5. Penurunan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp19.925.844 atau (46,54%) karena berkurangnya pengembalian.

Walaupun Realisasi pendapatan mengalami penurunan, beberapa akun mengalami kenaikan yaitu:

1. Kenaikan Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp67.293.000 atau (312,74%) karena bertambahnya pihak yang menyewa lahan di Satker 453374 (Bank Mandiri, Bank BRI & Koperasi Juanda Tiga Lima).
2. Peningkatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp42.800.000 atau 59,44% karena meningkatnya kegiatan pelatihan di satker 417654.

B.1. Pendapatan (lanjutan)

3. Peningkatan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan sebesar Rp44.080.000 atau 15,26% karena meningkatnya kegiatan dan peserta diklat dibandingkan dengan tahun 2023 di satker 417654.
4. Peningkatan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp6.794.528 atau 104,86% karena meningkatnya pengadaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian oleh vendor di satker 453374 dan 417654.
5. Peningkatan Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp747.975.000 atau 100,00% karena pemungutan denda atas pengenaan sanksi keterlambatan pelaporan ke PPATK baru dilaksanakan di Tahun 2024 di satker 453374.

Realisasi Belanja (Neto)
Rp266.404.815.683

B.2. Belanja

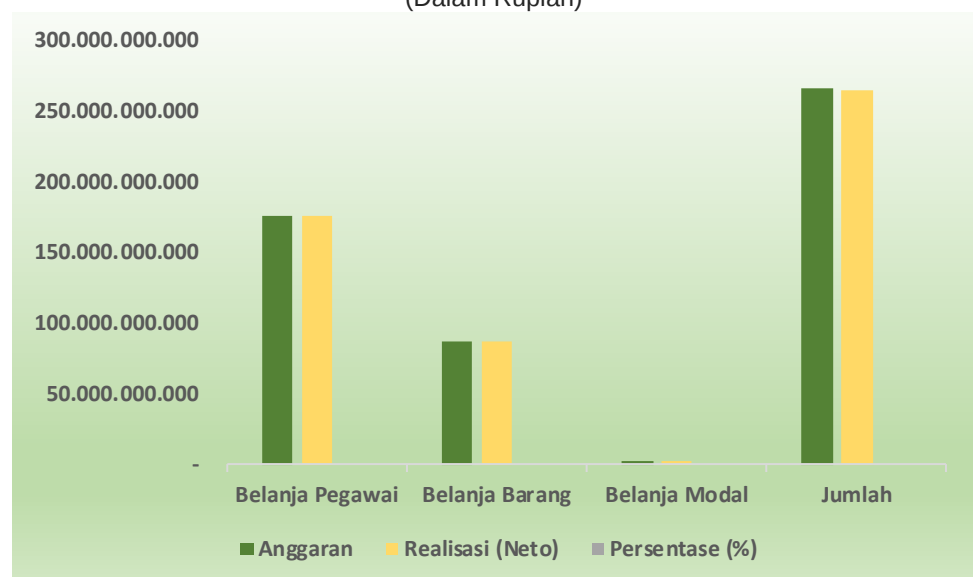
Realisasi Belanja (Neto) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp266.404.815.683 dan Rp295.324.440.555. Realisasi belanja di PPATK terdiri dari realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 menurut jenis belanja dijelaskan dalam Tabel 11.

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi (Neto)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	177.201.534.000	177.088.426.719	99,94
Belanja Barang	87.924.717.000	87.259.482.589	99,24
Belanja Modal	2.081.120.000	2.056.906.375	98,84
Jumlah	267.207.371.000	266.404.815.683	99,70

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik yang disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)



B.2. Belanja (lanjutan)

Realisasi Belanja 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 9,79% jika dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2023 yang disebabkan oleh penurunan Belanja Modal. Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 12.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja (Neto)
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi Anggaran 31 Desember 2024 (Neto)	Realisasi Anggaran 31 Desember 2023 (Neto)	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pegawai	177.088.426.719	146.522.906.500	30.565.520.219	20,86
Barang	87.259.482.589	99.117.426.538	(11.857.943.949)	(11,96)
Modal	2.056.906.375	49.684.107.517	(47.627.201.142)	(95,86)
Jumlah	266.404.815.683	295.324.440.555	(28.919.624.872)	(9,79)

Realisasi Belanja Pegawai
(Neto) Rp177.088.426.719

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp177.088.426.719 dan Rp146.522.906.500. Realisasi Belanja Pegawai di PPATK pada tahun 2024 digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai di Satker 453374 dan Satker 417654. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 13.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Belanja Bruto				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19.454.568.880	16.434.017.045	3.020.551.835	18,38
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	288.313	245.090	43.223	17,64
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.132.205.376	1.002.186.330	130.019.046	12,97
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	318.329.585	272.271.814	46.057.771	16,92
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	964.580.000	942.990.000	21.590.000	2,29
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.867.061.000	2.663.758.000	203.303.000	7,63
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	219.122.657	94.721.425	124.401.232	131,33
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	964.561.980	898.080.420	66.481.560	7,40
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.030.695.000	2.639.880.000	(609.185.000)	(23,08)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	320.950.000	270.945.000	50.005.000	18,46
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1.204.458.000	1.200.268.000	4.190.000	0,35
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	285.987.400	283.380.400	2.607.000	0,92
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.894.028.600	869.161.800	3.024.866.800	348,02
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	62.584	14.536	48.048	330,54
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	235.918.740	59.532.680	176.386.060	296,28
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	56.460.104	14.655.614	41.804.490	285,25
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	590.838.000	136.805.000	454.033.000	331,88
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	209.728.320	55.111.620	154.616.700	280,55
511628	Belanja Uang Makan PPPK	490.182.000	198.360.000	291.822.000	147,12
512111	Belanja Uang Honor Tetap	2.553.369.845	6.125.580.322	(3.572.210.477)	(58,32)
512211	Belanja Uang Lembur	247.895.000	488.880.000	(240.985.000)	(49,29)
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	46.782.000	14.002.000	32.780.000	234,11
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	122.523.888.273	107.950.626.590	14.573.261.683	13,50
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	16.554.116.518	3.922.528.643	12.631.587.875	322,03
	Jumlah Belanja Bruto	177.166.078.175	146.538.002.329	30.628.075.846	20,90
	Pengembalian Belanja Pegawai	77.651.456	15.095.829	62.555.627	414,39
	Total Belanja Pegawai	177.088.426.719	146.522.906.500	30.565.520.219	20,86

B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

Terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar 20,86%. Kenaikan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Belanja Gaji Pokok PNS naik sebesar Rp3.020.551.835 atau sebesar 18,38% karena kenaikan pangkat/golongan PNS dan penambahan jumlah CPNS/PNS.
2. Belanja Pembulatan Gaji PNS naik sebesar Rp43.223 atau sebesar 17,64% karena bertambahnya jumlah pegawai.
3. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS naik sebesar Rp130.019.046 atau sebesar 12,97 %, antara lain karena penambahan jumlah pegawai yang menikah.
4. Belanja Tunjangan Anak PNS naik sebesar Rp46.057.771 atau sebesar 16,92% antara lain karena penambahan jumlah tanggungan PNS.
5. Belanja Tunj. Struktural PNS naik sebesar Rp21.590.000 atau sebesar 2,29% antara lain karena sudah terisinya sebagian posisi Eselon I.
6. Belanja Tunjangan Fungsional PNS naik sebesar Rp203.303.000 atau sebesar 7,63% karena penambahan jumlah pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu dan kenaikan jenjang fungsional.
7. Belanja Tunjangan PPh PNS naik sebesar Rp124.401.232 atau sebesar 131,33%, antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
8. Belanja Tunjangan Beras PNS naik sebesar Rp66.481.560 atau sebesar 7,40% antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
9. Belanja Tunjangan Umum PNS naik sebesar Rp50.005.000 atau sebesar 18,46% antara lain karena bertambahnya pegawai dengan jabatan fungsional umum.
10. Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara sebesar Rp4.190.000 atau sebesar 0,35% karena adanya kenaikan pangkat pejabat negara.
11. Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara sebesar Rp2.607.000 atau sebesar 0,92% karena ada perubahan besaran pungutan PPh 21.
12. Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp3.024.866.800 atau sebesar 348,02% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK dan pembayaran dimulai dari awal tahun anggaran.
13. Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp48.048 atau sebesar 330,54% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK dan pembayaran dimulai dari awal tahun anggaran.
14. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK sebesar Rp176.386.060 atau sebesar 296,28% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK dan pembayaran dimulai dari awal tahun anggaran.

B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

15. Belanja Tunjangan Anak PPPK sebesar Rp41.804.490 atau sebesar 285,25% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK dan pembayaran dimulai dari awal tahun anggaran.
16. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp454.033.000 atau sebesar 331,88% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK dan pembayaran dimulai dari awal tahun anggaran.
17. Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp154.616.700 atau sebesar 280,55% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK dan pembayaran dimulai dari awal tahun anggaran.
18. Belanja Uang Makan PPPK sebesar Rp291.822.000 atau sebesar 147,12% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK dan pembayaran dimulai dari awal tahun anggaran.
19. Belanja Uang Lembur PPPK sebesar Rp32.780.000 atau sebesar 234,11% karena kegiatan lembur baru dilaksanakan di tahun 2024.
20. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) naik sebesar Rp14.573.261.683 atau sebesar 13,50% karena kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan jumlah CPNS, dan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 sebesar 100% Tunjangan Khusus/Kegiatan.
21. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp12.631.587.875 atau sebesar 322,03% karena bertambahnya jumlah pegawai berstatus PPPK dan pembayaran dimulai dari awal tahun anggaran.

Penurunan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, terdiri dari:

1. Belanja Uang Makan PNS turun sebesar Rp609.185.000 atau sebesar 23,08% karena uang makan bulan Juli sampai dengan Desember belum dibayarkan.
2. Belanja Uang Honor Tetap turun sebesar Rp3.571.210.477 atau sebesar 58,32% karena Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diangkat menjadi PPPK.
3. Belanja Uang Lembur turun sebesar Rp240.985.000 atau sebesar 49,29% karena berkurangnya kegiatan lembur.

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp77.651.456 yang terdiri dari:

- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp13.564.
- b. Belanja Tunjangan Struktural PNS sebesar Rp2.107.500.
- c. Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp8.331.160.
- d. Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp925.000.
- e. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp352.

B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

- f. Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK sebesar Rp41.000.
- g. Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap sebesar Rp632.880.
- h. Pengembalian Belanja (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp65.449.000

Realisasi Belanja Barang (Neto)
Rp87.259.482.589

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp87.259.482.589 dan Rp99.117.426.538. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 14.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5.643.289.668	9.348.531.313	(3.705.241.645)	(39,63)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	250.621.004	182.789.706	67.831.298	37,11
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20.496.000	42.720.000	(22.224.000)	(52,02)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	431.386.423	521.012.919	(89.626.496)	(17,20)
521211	Belanja Bahan	2.598.978.258	3.145.891.943	(546.913.685)	(17,39)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	386.900.000	1.178.000.000	(791.100.000)	(67,16)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.791.248.724	3.418.754.919	(1.627.506.195)	(47,61)
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	75.000.000	-	75.000.000	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.542.055.432	2.992.716.238	(1.450.660.806)	(48,47)
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	270.265.661	487.537.631	(217.271.970)	(44,57)
522111	Belanja Langganan Listrik	5.343.056.009	4.987.068.954	355.987.055	7,14
522112	Belanja Langganan Telepon	159.482.341	158.270.062	1.212.279	0,77
522113	Belanja Langganan Air	148.456.525	1.678.200	146.778.325	8.746,18
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.531.179.901	2.387.290.816	1.143.889.085	47,92
522131	Belanja Jasa Konsultan	2.769.879.610	2.843.359.915	(73.480.305)	(2,58)
522141	Belanja Sewa	2.815.818.055	3.221.128.023	(405.309.968)	(12,58)
522151	Belanja Jasa Profesi	891.355.120	1.683.795.340	(792.440.220)	(47,06)
522191	Belanja Jasa Lainnya	5.983.515.998	2.193.741.268	3.789.774.730	172,75
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.842.691.723	2.015.272.191	(172.580.468)	(8,56)
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	444.655.018	437.373.311	7.281.707	1,66
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.071.717.857	30.408.251.539	663.466.318	2,18
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	4.949.019.357	4.837.221.160	111.798.197	2,31
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6.961.249.104	9.812.917.134	(2.851.668.030)	(29,06)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	591.360.000	502.670.000	88.690.000	17,64
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.215.235.260	2.357.604.285	(1.142.369.025)	(48,45)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.720.008.091	5.137.429.838	(3.417.421.747)	(66,52)
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	464.604.258	81.184.473	383.419.785	472,28
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	3.445.705.940	4.788.389.695	(1.342.683.755)	(28,04)
	Jumlah Belanja Barang Bruto	87.359.231.337	99.172.600.873	(11.813.369.536)	(11,91)
	Pengembalian Belanja	99.748.748	55.174.335	44.574.413	80,79
	Total Belanja Barang	87.259.482.589	99.117.426.538	(11.857.943.949)	(11,96)

Penurunan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu adalah sebesar 11,96%.

Penurunan realisasi Belanja Barang disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Belanja Keperluan Perkantoran turun sebesar Rp3.705.241.645 atau 39,63% karena efisiensi anggaran.

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

2. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja turun sebesar Rp22.224.000 atau 52,02% karena berkurangnya kegiatan yang membutuhkan honor.
3. Belanja Barang Operasional Lainnya turun sebesar Rp89.626.496 atau 17,20% karena efisiensi anggaran.
4. Belanja Bahan turun sebesar Rp546.913.685 atau 17,39% karena efisiensi anggaran.
5. Belanja Barang Honor Output Kegiatan turun sebesar Rp791.100.000 atau 67,16% karena berkurangnya kegiatan yang membutuhkan pembayaran honor.
6. Belanja Barang Non Operasional Lainnya turun sebesar Rp1.627.506.195 atau 47,61% karena efisiensi anggaran.
7. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi turun sebesar Rp1.450.660.806 atau 48,47% karena efisiensi anggaran.
8. Belanja Barang Persediaan Lainnya sebesar Rp217.271.970 atau 48,47% karena efisiensi anggaran.
9. Belanja Jasa Konsultan turun sebesar Rp73.480.305 atau 2,58% karena berkurangnya kegiatan yang menggunakan tenaga ahli.
10. Belanja Sewa turun sebesar Rp405.309.968 atau 12,58%.
11. Belanja Jasa Profesi turun sebesar Rp792.440.220 atau 47,06% karena berkurangnya kegiatan yang membutuhkan konsultan eksternal.
12. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan turun sebesar Rp172.580.468 atau 2,18% karena berkurangnya pemeliharaan Gedung dan bangunan.
13. Belanja Perjalanan Dinas Biasa turun sebesar Rp2.851.668.030 atau 29,06% karena berkurangnya kegiatan perjalanan dinas dan audit.
14. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota turun sebesar Rp1.142.369.025 atau 48,45% karena efisiensi anggaran.
15. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota turun sebesar Rp3.417.421.747 atau 66,52% karena efisiensi anggaran.
16. Belanja Perjalanan Lainnya – luar Negeri turun sebesar Rp1.342.683.755 atau 28,04% karena berkurangnya kegiatan undangan luar negeri.

Kenaikan realisasi Belanja Barang dan Jasa, sebagai berikut:

1. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp67.8331.298 atau 37,11% dikarenakan meningkatnya pengiriman dokumen secara fisik.
2. Belanja Langganan Listrik naik sebesar Rp355.987.055 atau 7,14% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor.
3. Belanja Langganan Telepon naik sebesar Rp1.212.279 atau 0,77% disebabkan peningkatan penggunaan telepon kantor untuk mendukung operasional perkantoran.

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

4. Belanja Langganan Air naik sebesar Rp146.778.325 atau 8,746,18% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor dan kerusakan meteran yang menyebabkan kekurangan pembayaran.
5. Belanja Langganan daya dan Jasa Lainnya naik sebesar Rp1.143.889.085 atau 47,92% disebabkan pembayaran Langganan Lisensi Software Manajemen Perkantoran (cloud storage google drive, template lisensi unit kegiatan pelatihan, aplikasi absensi pegawai Gedung Arsip Ciloto, langganan akun aplikasi Canva, langganan aplikasi Articulate 360, langganan internet Pusdiklat APU PPT dan Gedung Arsip Ciloto, Lisensi Aplikasi Video Conference dan layanan internet gedung Wisma Mandiri.
6. Belanja Jasa Lainnya naik sebesar Rp3.789.774.730 atau 172,75% antara lain disebabkan meningkatnya kegiatan yang menggunakan narasumber eksternal.
7. Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp7.281.707 atau 1,66% disebabkan meningkatnya premi.
8. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp663.466.318 atau 2,18% karena meningkatnya kegiatan pemeliharaan.
9. Belanja Pemeliharaan Lainnya naik sebesar Rp111.798.197 atau 2,31% karena meningkatnya kegiatan pemeliharaan aset tetap.
10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota naik sebesar Rp88.690.000 atau 17,64% karena meningkatnya kegiatan perjalanan dinas dan audit dalam kota.
11. Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri naik sebesar Rp383.419.785 atau 472,28% karena meningkatnya kegiatan di luar negeri yang terkait dengan keanggotaan FATF.

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Barang senilai Rp99.748.748, terdiri dari:

1. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp96.725.
2. Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp255.000.
3. Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar Rp1.560.000.
4. Pengembalian Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan sebesar Rp60.159.992.
5. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp13.836.484.
6. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp340.000.
7. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya – Luar Negeri sebesar Rp23.500.547.

Realisasi Belanja Modal (Neto)
Rp2.056.906.375

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.056.906.375 dan Rp49.684.107.517.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 15.

B.2.3 Belanja Modal (lanjutan)

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Belanja Bruto				
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-	-
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.341.800	46.373.735.157	(46.009.393.357)	(99,21)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.667.695.053	-	1.667.695.053	-
532121	Belanja Modal Penambah Nilai Peralatan dan Mesin	-	120.000.000	(120.000.000)	(100,00)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.372.995.000	(1.372.995.000)	(100,00)
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	5.400.000	-	5.400.000	-
533121	Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	66.993.520	(66.993.520)	(100,00)
536111	Belanja Modal Lainnya	19.969.522	1.750.383.840	(1.730.414.318)	(98,86)
	Jumlah Belanja Bruto	2.057.406.375	49.684.107.517	(47.626.701.142)	(95,86)
	Pengembalian Belanja Modal	500.000	-	500.000	-
	Total Belanja Modal	2.056.906.375	49.684.107.517	(47.627.201.142)	(95,86)

Terjadi penurunan realisasi Belanja Modal dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 95,86%. Penurunan belanja modal dikarenakan efisiensi anggaran untuk memenuhi belanja pegawai dan terdapat pengembalian belanja modal Upah Tenaga Kerja dan Honor sebesar Rp500.000.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar Rp14.124.695.667

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp14.124.695.667 dan Rp6.010.564.571.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar PPATK per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 135,00% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023. Hal tersebut disebabkan oleh penyesuaian belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan penambahan piutang terkait pengenaan sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan pihak pelapor ke PPATK di Tahun 2024. Rincian Aset Lancar PPATK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 16.

C.1. Aset Lancar (lanjutan)

Tabel 16
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	100,00
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	100,00
3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	12.228.109.622	4.494.720.138	7.733.389.484	172,05
4	Pendapatan yang masih harus diterima	136.500.000	11.886.118	124.613.882	-
5	Piutang Bukan Pajak	1.263.761.136	28.765.713	1.234.995.423	4.293,29
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(426.885.565)	(28.765.713)	(398.119.852)	1.384,01
7	Piutang Bukan Pajak (netto)	836.875.571	-	836.875.571	-
8	Persediaan	923.210.474	1.503.958.315	(580.747.841)	(38,61)
	Jumlah	14.124.695.667	6.010.564.571	8.114.131.096	135,00

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp0.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di dalam tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP dan LS ke Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan dan disetorkan kembali ke Kas Negara.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp0

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas atau aset yang disetarakan dengan kas yang masih akan disetorkan ke kas negara ataupun akan dibayarkan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja Dibayar Dimuka
(*prepaid*) Rp12.228.244.595

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp12.228.244.595 dan Rp4.494.720.138. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh, tetapi barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software* pada Satker 417654 sebesar Rp10.979.279 dan Satker Pusat 453374 sebesar Rp12.217.130.343. Rincian perpanjangan Lisensi Satker 453374 per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 17.

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) (lanjutan)

Tabel 17
Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software*
Satker 453374
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

No	Uraian Perpanjangan Lisensi	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Access Switch	-	116.402.000	(116.402.000)	(100,00)
2	Acunetix Standard	93.240.000	80.744.571	12.495.429	15,48
3	AD 360 Manage Engine	398.230.769	154.409.189	243.821.580	157,91
4	Adobe Creative Cloud	105.428.867	99.567.312	5.861.555	5,89
5	AdSelf Service	-	18.287.705	(18.287.705)	(100,00)
6	Annual fee GoAML	1.220.274.099	806.172.360	414.101.739	51,37
7	Application Manager	13.171.264	119.784.467	(106.613.203)	(89,00)
8	Aruba	263.013.699	-	263.013.699	-
9	Asset Explorer	-	53.542.336	(53.542.336)	(100,00)
10	Audit Command Language (ACL)	-	17.522.217	(17.522.217)	(100,00)
11	Cisco	335.990.301	-	335.990.301	-
12	Coreldraw	5.531.925	10.991.700	(5.459.775)	(49,67)
13	Crypto Analytics	312.019.231	-	-	-
14	Desktop Central	346.593.407	-	-	-
15	ESTIM	118.340.934	41.822.131	76.518.803	182,96
16	Juniper	169.315.068	-	169.315.068	-
17	Lisensi PHPRunner	-	7.082.712	(7.082.712)	(100,00)
18	Lisensi Support Suse Linux	-	346.575.220	(346.575.220)	(100,00)
19	ManageEngine Endpoint Central Enterprise Edition	-	128.575.000	(128.575.000)	(100,00)
20	Mdaemon	286.688.356	263.891.583	22.796.773	8,64
21	Microsoft Office 365	533.736.986	415.296.921	118.440.065	28,52
22	Mobile Device Management	46.669.648	45.970.984	698.664	1,52
23	Mvision MV2 Protect Plus	-	185.842.399	(185.842.399)	(100,00)
24	Nas	219.299.178	-	219.299.178	-
25	Nessus	46.670.316	-	46.670.316	-
26	OP Manager	-	39.357.923	(39.357.923)	(100,00)
27	Oracle	147.053.984	73.080.929	73.973.055	101,22
28	Perpanjangan Lisensi Support Data Domain	-	312.576.000	(312.576.000)	(100,00)
29	Router	-	20.174.136	(20.174.136)	(100,00)
30	San Storage	3.680.950.685	-	3.680.950.685	-
31	Server Dell	461.076.923	-	461.076.923	-
32	Server Farm Switch	-	23.214.074	(23.214.074)	(100,00)
33	Sewa Whatsapp Business Official	-	76.629.730	(76.629.730)	(100,00)
34	Site Recovery Manager	-	12.798.361	(12.798.361)	(100,00)
35	SSL certificate	-	197.202.806	(197.202.806)	(100,00)
36	Support TeamMate+	23.099.588	22.805.951	293.637	1,29
37	Tableau	172.307.692	159.837.574	12.470.118	7,80
38	Trellix	-	398.590.565	(398.590.565)	(100,00)
39	Vcenter	-	31.867.918	(31.867.918)	(100,00)
40	Veritas Netbackup	76.500.000	85.159.200	(8.659.200)	(10,17)
41	Vmware	355.385.192	-	355.385.192	-
42	VPN	2.625.550.087	-	2.625.550.087	-
43	VSphere 7 Enterprise Plus	-	124.975.057	(124.975.057)	(100,00)
44	Whatsapp	160.992.143	-	160.992.143	-
Jumlah		12.217.130.343	4.490.751.031	7.067.766.675	157,38

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp136.500.000

C.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp136.500.000 dan Rp11.886.118.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan akrual pendapatan yang telah diterima atau akan diterima setelah tanggal laporan.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp136.500.000 merupakan denda keterlambatan pelaporan yang diterima PPATK sampai dengan 31 Januari 2025 sebanyak 11 pihak pelapor.

Piutang Bukan Pajak
Rp1.263.761.136

C.1.5 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.263.761.136 dan Rp28.765.713.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Piutang Bukan Pajak di PPATK yang memiliki kualitas Lancar sebesar Rp102.470.423 merupakan hasil tindaklanjut temuan BPK Tahun 2024 yang merupakan pengembalian belanja pekerjaan pembangunan gedung multimedia.

Piutang Bukan Pajak di PPATK yang memiliki kualitas Kurang Lancar sebesar Rp816.575.000 merupakan piutang pihak pelapor.

Piutang Bukan Pajak di PPATK yang memiliki kualitas **Macet** sebesar Rp344.715.713 yang berasal dari

1. Pendapatan denda ke 8 (delapan) Pihak Pelapor yang diberikan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp315.950.000, tetapi belum dilimpahkan ke PUPN karena masih dalam tahap koordinasi.
2. pengembalian belanja barang dan modal di satker 417654 berasal dari CV KAK, telah dilakukan upaya penagihan sebanyak 3 (tiga) kali melalui:
 - a. Surat Penagihan Pertama Nomor T/033/PL.02/VIII/2022 tanggal 29 Agustus Tahun 2022.
 - b. Surat Penagihan kedua Nomor T/036/PL.02/IX/2022 tanggal 9 September Tahun 2022.
 - c. Surat Penagihan ketiga Nomor T/043/PL.02/X/2022 tanggal 7 Oktober Tahun 2022.

Piutang di satker 417654 belum dibayarkan sehingga kualitas piutangnya diturunkan menjadi *macet* dan dilakukan pelimpahan ke PUPN dengan surat nomor T/531/PL.02/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan telah diterima dan disetujui oleh PUPN dengan surat Nomor SP3N-19/PUPNC.13.03/2022 tanggal 21 Desember 2022.

Rincian kualitas Piutang Bukan Pajak pada PPATK per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Kualitas Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

No	Kualitas Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Lancar	102.470.423	-	102.470.423	-
2	Kurang Lancar	816.575.000	-	816.575.000	-
3	Diragukan	-	-	-	-
4	Macet	344.715.713	28.765.713	315.950.000	1.098,36
Jumlah		1.263.761.136	28.765.713	1.234.995.423	4.293,29

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Rp426.885.565

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp426.885.565 dan Rp28.765.713.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Rincian kualitas Piutang Bukan Pajak pada PPATK per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

No	Kualitas Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Lancar	512.352	-	512.352	-
2	Kurang Lancar	81.657.500	-	81.657.500	-
3	Diragukan	-	-	-	-
4	Macet	344.715.713	28.765.713	315.950.000	1.098,36
Jumlah		426.885.565	28.765.713	398.119.852	1.384,01

Persediaan Rp923.210.474

C.1.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp923.210.474 dan Rp1.503.958.315.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, untuk dijual, atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Seluruh persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Konsumsi	714.112.421	1.120.416.879	(406.304.458)	(36,26)
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	35.191.564	82.445.284	(47.253.720)	(57,32)
3	Bahan Baku	102.928.062	6.485.460	96.442.602	1.487,06
4	Suku Cadang	3.049.200	118.281.613	(115.232.413)	(97,42)
5	Persediaan Lainnya	67.929.227	176.329.079	(108.399.852)	(61,48)
Jumlah		923.210.474	1.503.958.315	(580.747.841)	(38,61)

Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 38,61% jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2023 karena pemakaian lebih besar dari pembelian.

Aset Tetap
Rp476.996.127.775

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp476.996.127.775 dan Rp496.053.113.127 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 3,72% jika dibandingkan dengan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023. Rincian Aset Tetap PPATK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	235.898.373.342	235.898.373.342	-	-
2	Peralatan dan Mesin	228.394.757.642	231.682.791.394	(3.288.033.752)	(1,42)
3	Gedung dan Bangunan	235.461.247.464	231.903.803.902	3.557.443.562	1,53
4	Jalan irigasi dan Jaringan	235.602.000	235.602.000	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1.108.869.890	720.400.368	388.469.522	53,92
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.669.142.180	99.017.550	1.570.124.630	1.585,70
Jumlah		702.767.992.518	700.539.988.556	2.228.003.962	0,32
Akumulasi Penyusutan		(225.771.864.743)	(204.486.875.429)	(21.284.989.314)	10,41
Nilai Buku Aset Tetap		476.996.127.775	496.053.113.127	(19.056.985.352)	(3,84)

Penurunan Aset Tetap sebesar 3,84% berasal dari Peralatan dan Mesin yang turun sebesar Rp21.284.989.314 atau 10,41% karena meningkatnya penyusutan.

Tanah Rp235.898.373.342

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PPATK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp235.898.373.342 dan Rp235.898.373.342.

Aset PPATK berupa tanah, terdiri dari:

1. Tanah seluas 4.500 m² berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat senilai Rp194.364.000.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada tahun 2007.
2. Tanah seluas 5.648 m² berlokasi di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat senilai Rp8.256.529.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada tahun 2010.

C.2.1 Tanah (lanjutan)

3. Tanah seluas 9.510 m² berlokasi di Jl. Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat senilai Rp28.784.107.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM.6/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PPATK dan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-1705/KN/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal Roya Hak Tanggungan SHM No. 87/Cimpaeun.
4. Tanah seluas 120 m² berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp332.436.600. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014.
5. Tanah seluas 120 m² berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp394.585.440. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 02 tanggal 16 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014.
6. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp528.900.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-053A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 9 September 2019.
7. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp490.200.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-061A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019.
8. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp610.600.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-062A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019.

C.2.1 Tanah (lanjutan)

9. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp770.350.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-056.12/PL.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
10. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp597.850.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-057.12/PL.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
11. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp768.465.302. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan BAST No. BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. sertifikat masih dalam proses balik nama dan penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Depok.
12. Pengembangan nilai aset berupa pengurusan surat pelepasan hak tujuh unit rumah dengan nomor berkas permohonan 123587/2021, 123792/2021, 123802/2021, 123838/2021, 123594/2021, 123833/2021, dan 120981/2021 senilai total Rp350.000.

Mutasi Tanah per 31 Desember 2024 dijelaskan dalam Tabel 22.

Tabel 22
Mutasi Tanah
Per 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	235.898.373.342
Tanah (Lokasi Jakarta Pusat)	194.364.000.000
Tanah (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	8.256.529.000
Tanah (Lokasi Depok Jawa Barat)	33.277.844.342
Mutasi tambah tahun 2024:	
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi kurang tahun 2024:	
	0
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	-
Saldo per 31 Desember 2024	235.898.373.342
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	235.898.373.342

Peralatan dan Mesin
Rp228.871.283.966

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp1.000.000/unit. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp228.871.283.966 dan Rp231.682.791.394.

Mutasi peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 23.

C.2.2 Peralatan dan Mesin (lanjutan)

Tabel 23
Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	231.682.791.394
<i>Mutasi tambah tahun 2023:</i>	
Pembelian	364.341.800
Hibah Masuk	1.042.632.200
Koreksi Pencatatan	14.080.905
Total Mutasi Tambah	1.421.054.905
<i>Mutasi kurang tahun 2023:</i>	
Penghentian aset dari penggunaan	4.684.644.657
Koreksi Pencatatan	24.444.000
Total Mutasi Kurang	4.709.088.657
Total Mutasi Tambah (Kurang)	(3.288.033.752)
Saldo per 31 Desember 2024	228.394.757.642
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(189.351.307.143)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	39.043.450.499

Transaksi mutasi tambah peralatan dan mesin berasal dari pembelian menggunakan belanja modal sebesar Rp364.341.800. Transaksi Mutasi kurang peralatan dan mesin berasal dari penghentian aset dari operasional kantor sebesar Rp4.194.037.428.

Gedung dan Bangunan
Rp235.461.247.464

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu sebesar Rp235.461.247.464 dan Rp231.903.803.902.

Gedung dan Bangunan PPATK per 31 Desember 2023, terdiri dari:

1. Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikelola oleh Satker 453374 yaitu Gedung Kantor Permanen Gedung PPATK di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat dengan luas bangunan 16.630 m² senilai Rp132.652.125.817.
2. Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikelola oleh Satker 417654 sebesar Rp99.251.678.085, yaitu:

No	Uraian	NUP	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Sub Kelompok Barang	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung Pusdiklat APUPPT (Cimanggis) di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.	1	6.502	69.433.003.277	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik
2	Berlokasi di Komplek Pusdiklat PPATK, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat ; dan	3	122	-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Dihapus

3	Berlokasi di Komplek Pusdiklat PPATK, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.	4	58	258.982.240	Klinik	Baik
4	Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A8, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	5		285.424.800	Gudang	Baik
5	Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A10, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	7		-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dihapus
6	Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A11, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	6		-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dihapus
7	Pagar permanen			322.414.070	Pagar Permanen	
8	Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Cimpaeun atas nama Wiwik Setyaji (A12) dengan Notaris Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn.	8	127	275.000.000	Gudang	Baik
9	Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Cimpaeun atas nama Nurlaila Sundari (No. A6) dengan Notaris Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn.	9	50	-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Dihapus
10	Transfer masuk Gedung Arsip Ciloto	10		28.072.324.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat
11	Pengadaan Rumah berdasarkan Surat Perjanjian No:Perj-055/PL.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan BAST No: BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023	11		604.529.698	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik
Total				99.251.678.085		

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.194.359.464.

Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dijelaskan dalam Tabel 24.

C.2.3 Gedung dan Bangunan (lanjutan)

Tabel 24
Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	231.903.803.902
Gedung Kantor (Lokasi Jakarta Pusat)	128.158.288.773
Gedung Arsip (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	28.072.324.000
Gedung Pusdiklat APUPPT (Lokasi Depok Jawa Barat)	71.463.237.011
<i>Mutasi tambah tahun 2024:</i>	
Pengembangan melalui KDP	4.981.380.300
Total Mutasi Tambah	4.981.380.300
<i>Mutasi kurang tahun 2024:</i>	
Penghentian penggunaan	1.423.936.738
Total Mutasi Kurang	1.423.936.738
Total Mutasi Tambah (Kurang)	3.557.443.562
Saldo per 31 Desember 2024	235.461.247.464
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(36.194.359.548)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	199.266.887.916

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp235.602.000

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu sebesar Rp235.602.000 dan Rp235.602.000. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp151.199.412, dengan rincian mutasi dijelaskan dalam Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	235.602.000
<i>Mutasi tambah tahun 2024:</i>	
· Transfer masuk	-
Total Mutasi Tambah	-
<i>Mutasi kurang tahun 2024:</i>	
· Transfer keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	-
Saldo per 31 Desember 2024	235.602.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(140.589.375)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	95.012.625

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang di tahun 2024.

Aset Tetap Lainnya
Rp1.108.869.890

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu sebesar Rp1.108.869.890 dan Rp720.400.368 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam Aset Tetap Lainnya, antara lain buku perpustakaan dan benda seni. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dijelaskan dalam Tabel 26.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya (lanjutan)

Tabel 26
Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya
Tahun 2024
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	720.400.368
<i>Mutasi tambah tahun 2024:</i>	
Pembelian	19.969.522
Hibah Masuk	368.500.000
Total Mutasi Tambah	388.469.522
<i>Mutasi kurang tahun 2024:</i>	
Revaluasi Aset Lainnya	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	388.469.522
Saldo per 31 Desember 2024	1.108.869.890
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(61.382.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.047.487.390

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp1.669.142.180

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.669.142.180 dan Rp99.017.550. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini merupakan pengembangan nilai gedung dan bangunan (jasa perencana) di satker 417654 sebesar Rp1.669.142.180 perolehan tahun 2022, namun pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024.

Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap Rp225.771.864.743

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp225.771.864.743 dan Rp204.486.875.429. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang dijelaskan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dijelaskan dalam Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan 2023	Kenaikan (Penurunan)	
						Rp	%
1	Tanah	235.898.373.342	-	235.898.373.342	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	228.394.757.642	(189.351.307.143)	39.043.450.499	(172.405.473.882)	16.945.833.261	9,83
3	Gedung dan Bangunan	235.461.247.464	(36.197.175.730)	199.264.071.734	(31.884.473.343)	4.312.702.387	13,53
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.602.000	(140.589.375)	95.012.625	(140.399.454)	189.921	0,14
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.669.142.180	(21.409.995)	1.690.552.175	-	21.409.995	-
6	Aset Tetap Lainnya	1.108.869.890	(61.382.500)	1.047.487.390	(56.528.750)	4.853.750	8,59
	Jumlah	702.767.992.518	(225.771.864.743)	476.996.127.775	(204.486.875.429)	(21.284.989.314)	10,41

Aset Lainnya Rp20.374.708.388

C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.374.708.388 dan Rp18.872.648.333 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan *software* ataupun aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya untuk operasional pemerintah dengan nilai buku sebesar Rp303.600.000. Rincian Nilai Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain) pada tanggal pelaporan dijelaskan dalam Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	48.359.359.660	44.857.359.660	3.502.000.000	7,81
2	Dana yang dibatasi Penggunaannya	2.034.144.609	900.470.326	1.133.674.283	125,90
3	Aset Lain-Lain	303.600.000	5.088.200.711	(4.784.600.711)	(94,03)
Jumlah		50.697.104.269	50.846.030.697	(148.926.428)	(0,29)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(30.322.395.881)	(31.973.382.364)	1.650.986.483	(5,16)
Aset Lainnya		20.374.708.388	18.872.648.333	1.502.060.055	7,96

Aset Tak Berwujud
Rp48.359.359.660

C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak berwujud fisik. Pada PPATK aset tersebut berupa *software* maupun antivirus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.359.359.660 dan Rp44.857.359.660.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dijelaskan dalam Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	44.857.359.660
Mutasi tambah tahun 2024:	
Realisasi Belanja Modal Lainnya	
Pengembangan nilai aset	-
Koreksi Pencatatan	3.502.000.000
Total Mutasi Tambah	3.502.000.000
Mutasi kurang tahun 2024:	
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-
Koreksi Pencatatan	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	3.502.000.000
Saldo per 31 Desember 2024	48.359.359.660
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(30.625.995.881)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	17.733.363.779

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.625.995.881.

Dana yang Dibatasi

Penggunaannya Rp2.034.144.609

C.3.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp2.034.144.609 dan Rp900.470.326. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang sudah ditentukan penggunaannya untuk membayar tagihan atau kegiatan lainnya. Per 31 Desember 2024 seluruh Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang ditahan untuk pembayaran RPATA yang dibayarkan di Tahun 2025 dan seluruh pembayaran telah dilakukan.

Aset Lain-lain Rp303.600.000

C.3.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu sebesar Rp303.600.000 dan Rp5.088.200.711. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan dan dalam proses penghapusan. Aset Lain-lain yang terdapat di PPATK per 31 Desember 2024 seluruhnya merupakan Aset Tak Berwujud (ATB) yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan selanjutnya akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan atas ATB yang tidak digunakan tersebut.

Akumulasi

Penyusutan/Amortisasi Aset
Lainnya Rp30.322.395.881

C.3.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.322.395.881 dan Rp31.973.382.364. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 30.

Tabel 30
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

No	Aset Lain-Lain	Nilai per 31 Desember 2024	Akum. Penyusutan/Amor tisasi 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024	Akum. Penyusutan/Amo rtisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
						Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	48.359.359.660	(30.625.995.881)	17.733.363.779	(26.885.181.653)	(3.740.814.228)	13,91
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	303.600.000	303.600.000	607.200.000	(5.088.200.711)	5.391.800.711	(105,97)
Jumlah		48.662.959.660	(30.322.395.881)	18.340.563.779	(31.973.382.364)	1.650.986.483	(5,16)

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek
Rp9.887.270.401

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp9.887.270.401 dan Rp1.639.222.662.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 31.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek (lanjutan)

Tabel 31
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	9.820.546.228	1.630.257.245	8.190.288.983	502,39
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-	-
3	Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	66.724.173	8.965.417	57.758.756	644,24
5	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	9.887.270.401	1.639.222.662	8.248.047.739	503,17

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023, yaitu sebesar 503.17%. Hal ini disebabkan oleh akrual belanja pegawai dan barang pada pos utang kepada pihak ketiga;

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp9.820.546.228

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.820.546.228 dan Rp1.630.257.245, mengalami kenaikan sebesar Rp8.190.288.983 atau 502,39%

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga (lanjutan)

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dengan rincian, sebagai berikut:

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp6.844.125.180 yang merupakan kekurangan pembayaran gaji untuk pegawai.
- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp942.276.439 yang merupakan akrual pembayaran tagihan listrik, air dan telpon.
- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp2.034.144.609 yang berasal dari spm RPATA yang akan dibayarkan di tahun 2025.

Utang Yang Belum Ditagihkan
Rp0

C.4.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual pada saat pengakuan pencatatan BAST dari pihak ketiga. Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

Hibah Yang Belum Disahkan
Rp0

C.4.3 Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka
Rp66.724.173

C.4.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah disetor ke kas negara, tetapi barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB. Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp66.724.173 dan Rp8.965.417.

Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp66.724.173 merupakan jasa sewa yang masih harus diberikan PPATK kepada:

1. Bank BRI atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin ATM dengan Perjanjian Sewa antara PPATK dengan BRI Cabang Veteran Jakarta untuk masa sewa 1 Juni 2024 s.d. 31 Mei 2026 (2 tahun) sebesar Rp39.405.000 dengan nomor referensi NTPN AD5380NA04MFPRAK dan nomor Perjanjian: PERJ-03/PL.02.04/PPATK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.
2. Bank Mandiri atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin ATM dengan Perjanjian Sewa antara PPATK dengan BRI Cabang Veteran Jakarta untuk masa sewa 1 Juni 2024 s.d. 31 Mei 2026 (2 tahun) sebesar Rp39.405.000 dengan nomor referensi NTPN 8145B7QLUP9ISNVB dan nomor Perjanjian: PERJ-04/PL.02.04/PPATK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.

C.4.4 Pendapatan Diterima di Muka (lanjutan)

3. Koperasi Kodagama dengan kontrak atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin Jumpstart dan pantry lantai 2 dengan masa sewa 1 Juni 2024 s.d. 31 Mei 2029 (5 tahun) sebesar Rp10.000.000 dengan nomor referensi NTPN 974701JNFV2MLKRP dan nomor perjanjian: PERJ-02/PL.02.04/PPATK/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.4.5 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya
sebesar Rp0

C.4.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya merupakan kas yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

EKUITAS

Ekuitas Rp501.608.201.429

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp501.608.201.429 dan Rp519.297.103.369. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara Bukan
Pajak Lainnya Rp2.509.005.227*

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.509.005.227 dan Rp389.026.871.

Perbandingan Rincian Pendapatan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan pada Tabel 32.

Tabel 32
Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan PNBPN Lainnya				
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	31.051.244	20.873.666	10.177.578	48,76
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	114.800.000	72.000.000	42.800.000	59,44
Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan	332.880.000	288.800.000	44.080.000	15,26
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	13.273.983	7.353.205	5.920.778	80,52
Pendapatan Denda Lainnya	2.017.000.000	-	2.017.000.000	100,00
Jumlah Pendapatan PNBPN Lainnya	2.509.005.227	389.026.871	2.119.978.356	544,94

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp2.509.005.227 berasal dari:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp31.051.244 di satker 453374.
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi sebesar Rp114.800.000 yang merupakan pendapatan penggunaan asrama di satker 417654.
- Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan sebesar Rp332.880.000 di satker Pusdiklat APUPPT.
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp13.273.983.
- Pendapatan Denda Lainnya yang merupakan denda yang dipungut dari pihak pelapor sebesar Rp2.017.000.000.

Beban Pegawai
Rp183.925.089.079

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp183.925.089.079 dan Rp146.524.787.576. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 33.

Tabel 33
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	19.454.870.980	16.433.700.545	3.021.170.435	18,38
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	274.752	243.069	31.683	13,03
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.132.220.166	1.002.154.680	130.065.486	12,98
511122	Beban Tunj. Anak PNS	318.332.543	272.261.070	46.071.473	16,92
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	962.472.500	942.990.000	19.482.500	2,07
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.862.489.840	2.662.218.000	200.271.840	7,52
511125	Beban Tunj. PPh PNS	219.231.644	94.721.425	124.510.219	131,45
511126	Beban Tunj. Beras PNS	964.561.980	898.080.420	66.481.560	7,40
511129	Beban Uang Makan PNS	3.034.525.000	2.639.880.000	394.645.000	14,95
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	320.210.000	262.075.000	58.135.000	22,18
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	1.204.458.000	1.200.268.000	4.190.000	0,35
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	285.987.400	283.380.400	2.607.000	0,92
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	3.894.028.600	869.161.800	3.024.866.800	348,02
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	62.232	14.536	47.696	328,12
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	235.918.740	59.532.680	176.386.060	296,28
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	56.460.104	14.655.614	41.804.490	285,25
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	590.838.000	136.805.000	454.033.000	331,88
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	209.728.320	55.111.620	154.616.700	280,55
511628	Beban Uang Makan PPPK	709.362.000	198.360.000	511.002.000	257,61
512111	Beban Uang Honor Tetap	2.552.745.965	6.125.580.322	(3.572.834.357)	(58,33)
512211	Beban Uang Lembur	247.895.000	488.880.000	(240.985.000)	(49,29)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	46.782.000	14.002.000	32.780.000	234,11
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	127.533.133.342	107.950.626.590	19.582.506.752	18,14
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	17.088.499.971	3.920.084.805	13.168.415.166	335,92
Total Beban Pegawai		183.925.089.079	146.524.787.576	37.400.301.503	25,52

Terdapat kenaikan realisasi Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar 25,52% dibanding realisasi Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023. Kenaikan Beban Pegawai, antara lain disebabkan:

1. Beban Gaji Pokok PNS naik sebesar Rp3.021.170.435 atau sebesar 18,38% karena kenaikan pangkat/golongan PNS dan penambahan jumlah CPNS/PNS.
2. Beban Pembulatan Gaji PNS naik sebesar Rp31.683 atau sebesar 13,03% karena kenaikan pangkat/golongan PNS dan penambahan jumlah CPNS/PNS.

D.2. Beban Pegawai (lanjutan)

3. Beban Tunjangan Suami/Istri PNS naik sebesar Rp130.065.486 atau sebesar 12,98%, antara lain karena penambahan jumlah pegawai yang menikah.
4. Beban Tunjangan Anak PNS naik sebesar Rp46.071.473 atau sebesar 16,92% antara lain karena penambahan jumlah tanggungan PNS.
5. Beban Tunj. Struktural PNS naik sebesar Rp19.482.500 atau sebesar 2,07% antara lain karena sebagian besar posisi jabatan struktural telah diduduki.
6. Beban Tunjangan Fungsional PNS naik sebesar Rp200.271.840 atau sebesar 7,52% karena penambahan jumlah pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu, antara lain Pranata Komputer, Pranata Humas, Analis Anggaran, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Analis Transaksi Keuangan, dan Widyaiswara.
7. Beban Tunjangan PPh PNS naik sebesar Rp124.510.219 atau sebesar 131,45%, antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS dan perubahan cara perhitungan PPh 21.
8. Beban Tunjangan Beras PNS naik sebesar Rp66.481.560 atau sebesar 7,40% antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
9. Beban Uang Makan PNS sebesar Rp394.645.000 atau 14,95% antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
10. Beban Tunjangan Umum PNS naik sebesar Rp58.135.000 atau 22,18% karena bertambahnya pegawai yang berjabatan fungsional umum.
11. Beban Gaji Pokok Pejabat Negara naik sebesar Rp4.190.000 atau 0,35% karena bertambahnya jumlah pejabat struktural.
12. Beban Tunj. PPh Pejabat Negara naik sebesar Rp2.607.0000 atau 0,92% karena perubahan cara perhitungan PPh 21.
13. Beban Gaji Pokok PPPK sebesar Rp3.024.866.800 atau sebesar 348,02% karena bertambahnya jumlah PPPK dan juga pembayaran yang dimulai dari awal tahun anggaran.
14. Beban Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp47.696 atau sebesar 328,12% karena bertambahnya jumlah PPPK dan juga pembayaran yang dimulai dari awal tahun anggaran.
15. Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK sebesar Rp176.386.060 atau sebesar 296,28% karena bertambahnya jumlah PPPK dan juga pembayaran yang dimulai dari awal tahun anggaran.
16. Beban Tunjangan Anak PPPK sebesar Rp41.804.490 atau sebesar 285,25% karena bertambahnya jumlah PPPK dan juga pembayaran yang dimulai dari awal tahun anggaran.

D.2. Beban Pegawai (lanjutan)

17. Beban Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp454.033.000 atau sebesar 331,88% karena bertambahnya jumlah PPPK dan juga pembayaran yang dimulai dari awal tahun anggaran.
18. Beban Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp154.616.700 atau sebesar 280,55% karena bertambahnya jumlah PPPK dan juga pembayaran yang dimulai dari awal tahun anggaran.
19. Beban Uang Makan PPPK sebesar Rp511.002.000 atau sebesar 257,61% karena bertambahnya jumlah PPPK dan juga pembayaran yang dimulai dari awal tahun anggaran.
20. Beban Uang Lembur PPPK naik sebesar Rp32.780.000 atau sebesar 234,11% karena peningkatan frekuensi kegiatan lembur.
21. Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) naik sebesar Rp19.582.506.752 atau sebesar 18,14% karena kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan jumlah CPNS, dan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 sebesar 100% Tunjangan Khusus/Kegiatan.
22. Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp13.168.415.166 atau sebesar 335,92% karena bertambahnya jumlah PPPK dan juga pembayaran yang dimulai dari awal tahun anggaran.

Penurunan Beban Pegawai, antara lain disebabkan:

1. Beban Uang Honor Tetap sebesar Rp3.572.834.357 atau 58,33% karena berkurangnya jumlah PPNPN.
2. Beban Uang Lembur sebesar Rp240.985.000 atau 49,29% karena berkurangnya kegiatan lembur.

Beban Persediaan
Rp2.035.973.856

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.035.973.856 dan Rp3.094.813.449.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 34.

Tabel 34
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	1.708.228.810	2.818.663.229	(1.110.434.419)	(39,40)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	9.527.460	14.661.634	(5.134.174)	(35,02)
593149	Beban Persediaan Lainnya	318.217.586	261.488.586	56.729.000	21,69
Total Beban Persediaan		2.035.973.856	3.094.813.449	(1.058.839.593)	(34,21)

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.3 Beban Persediaan (lanjutan)

Pada periode 31 Desember 2024, terdapat penurunan Beban Persediaan sebesar 34,21%. Terdiri dari:

1. Beban Persediaan Konsumsi turun sebesar Rp1.110.434.419 atau 39,40% karena terdapat pengurangan kertas dengan system kerja paperless dan pengurangan toner.
2. Beban Persediaan Bahan Baku sebesar Rp5.134.174 atau 35,02% karena berkurangnya penggunaan bahan kebersihan dibandingkan dengan tahun lalu.

Sedangkan terdapat kenaikan pada:

1. Beban Persediaan Lainnya naik sebesar Rp56.729.000 atau 21,69% karena penggunaan kebutuhan persediaan obat-obatan di klinik dokter umum dan dokter gigi.

Beban Barang dan Jasa
Rp33.043.631.246

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp33.043.631.246 dan Rp35.797.317.056. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 35.

Tabel 35
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Beban Barang				
521111	Beban Keperluan Perkantoran	5.643.192.943	9.346.114.813	(3.702.921.870)	(39,62)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	250.621.004	182.789.706	67.831.298	37,11
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20.496.000	42.720.000	(22.224.000)	(52,02)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	431.386.423	520.955.219	(89.568.796)	(17,19)
521211	Beban Bahan	2.598.978.258	3.145.843.673	(546.865.415)	(17,38)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	386.645.000	1.178.000.000	(791.355.000)	(67,18)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.768.848.924	3.395.944.919	(1.627.095.995)	(47,91)
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	75.000.000	-	75.000.000	100,00
	Beban Jasa				
522111	Beban Langganan Listrik	5.555.622.583	5.298.806.099	256.816.484	4,85
522112	Beban Langganan Telepon	162.310.897	159.928.724	2.382.173	1,49
522113	Beban Langganan Air	152.449.525	4.061.200	148.388.325	3.653,80
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.523.659.906	2.306.523.520	1.217.136.386	52,77
522131	Beban Jasa Konsultan	2.769.879.610	2.840.959.915	(71.080.305)	(2,50)
522141	Beban Sewa	2.815.818.055	3.222.990.660	(407.172.605)	(12,63)
522151	Beban Jasa Profesi	889.795.120	1.684.545.340	(794.750.220)	(47,18)
522191	Beban Jasa Lainnya	5.983.515.998	2.193.741.268	3.789.774.730	172,75
595112	Beban Aset Ekstrakompiabel Peralatan dan Mesin	15.411.000	273.392.000	(257.981.000)	(94,36)
	Total Beban Barang dan Jasa	33.043.631.246	35.797.317.056	(2.495.704.810)	(7,69)

Pada 31 Desember 2024 terdapat penurunan Beban Barang dan Jasa sebesar 7,69%, terdiri dari:

D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

Penurunan Beban Barang dan Jasa terdiri dari:

1. Beban Keperluan Perkantoran turun sebesar Rp3.702.921.870 atau 39,62% karena diterapkannya system kerja paperless dan pengurangan toner.
2. Beban Honor Operasional Satuan Kerja turun sebesar Rp22.224.000 atau 52,02% disebabkan berkurangnya honorarium.
3. Beban Barang Operasional Lainnya turun sebesar Rp89.568.796 atau 17,19% karena efisiensi anggaran.
4. Beban Bahan turun sebesar Rp546.865.415 atau 17,38% karena efisiensi anggaran.
5. Beban Honor Output Kegiatan turun sebesar Rp791.355.000 atau 67,18% antara lain disebabkan karena berkurangnya kegiatan Komite TPPU.
6. Beban Barang Non Operasional Lainnya turun sebesar Rp1.627.095.995 atau 47,91% karena efisiensi anggaran.
7. Beban Jasa Konsultan turun sebesar Rp71.080.305 atau 2,50% yang disebabkan oleh berkurangnya kegiatan yang menggunakan tenaga ahli.
8. Beban Sewa turun sebesar Rp407.172.605 atau 12,63% antara lain disebabkan bertambahnya sewa kendaraan dinas Eselon II di PPATK.
9. Beban Jasa Profesi turun sebesar Rp794.750.220 atau 47,18% antara lain disebabkan karena berkurangnya penggunaan narasumber eksternal di beberapa kegiatan.
10. Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin turun sebesar Rp15.411.000 atau 94,36% karena perencanaan untuk kebutuhan pembelian peralatan dan mesin membaik.

Adapun kenaikan beban barang dan jasa yang terdiri dari:

1. Beban Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat naik sebesar Rp67.831.298 atau 37,11% disebabkan meningkatnya pengiriman surat secara fisik.
2. Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang sebesar Rp75.000.000 atau 100,00% merupakan hasil tindaklanjut dari temuan BPK tahun 2023 dimana pemberian hadiah menggunakan akun dimaksud.
3. Beban Langganan Listrik naik sebesar Rp256.816.484 atau 4,85% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor.
4. Beban Langganan Telpon naik sebesar Rp2.382.173 atau 1,49% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional kantor.
5. Beban Langganan Air naik sebesar Rp148.388.325 atau 3.653,80% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor.

D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

6. Beban Langganan daya dan Jasa Lainnya naik sebesar Rp1.217.136.386 atau 52,77% disebabkan pembayaran Langganan Lisensi Software Manajemen Perkantoran (cloud storage google drive, template lisensi unit kegiatan pelatihan, aplikasi absensi pegawai Gedung Arsip Ciloto, langganan akun aplikasi Canva, langganan aplikasi Articulate 360, langganan internet Pusdiklat APU PPT dan Gedung Arsip Ciloto, Lisensi Aplikasi Video Conference dan layanan internet gedung Wisma Mandiri.
7. Beban Jasa Lainnya naik sebesar Rp3.718.000.347 atau 381,90% disebabkan bertambahnya kegiatan yang membutuhkan tenaga ahli.

Beban Pemeliharaan
Rp27.359.056.084

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp27.359.056.084 dan Rp23.630.029.137. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Persediaan Suku Cadang, dan Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 36.

Tabel 36
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.842.691.723	2.015.272.191	(172.580.468)	(8,56)
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	384.495.026	437.373.311	(52.878.285)	(12,09)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.829.257.640	16.862.810.667	2.966.446.973	17,59
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	4.923.953.757	4.035.121.960	888.831.797	22,03
593113	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	305.633.563	192.114.239	113.519.324	59,09
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	73.024.375	87.336.769	(14.312.394)	(16,39)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Total Beban Pemeliharaan		27.359.056.084	23.630.029.137	3.729.026.947	15,78

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,78%.

Kenaikan Beban Pemeliharaan disebabkan:

1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp2.966.446.973 atau 17,59% karena meningkatnya kegiatan pemeliharaan di satker 453374.
2. Beban Pemeliharaan Lainnya naik sebesar Rp888.831.797 atau 22,03% karena meningkatnya kegiatan pemeliharaan.

D.5 Beban Pemeliharaan (lanjutan)

3. Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan sebesar Rp113.519.324 atau 59,09% karena meningkatnya penggunaan persediaan.

Penurunan realisasi Beban Pemeliharaan disebabkan, sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp172.580.468 atau 8,56% karena efisiensi anggaran.
2. Beban Asuransi Gedung dan Bangunan turun sebesar Rp52.878.285 atau 12,09% karena berkurangnya jumlah premi.
3. Beban Persediaan Suku Cadang turun sebesar Rp14.312.394 atau 16,39% karena berkurangnya penggunaan bahan persediaan di tahun 2023.

Beban Perjalanan Dinas
Rp14.360.485.622

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp14.360.485.622 dan Rp22.645.414.992. Beban tersebut adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 37.

Tabel 37
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.967.652.620	9.791.656.241	(2.824.003.621)	(28,84)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	591.020.000	501.770.000	89.250.000	17,79
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.215.235.260	2.357.304.285	(1.142.069.025)	(48,45)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.699.768.091	5.133.722.846	(3.433.954.755)	(66,89)
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	464.604.258	81.184.473	383.419.785	472,28
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	3.422.205.393	4.779.777.147	(1.357.571.754)	(28,40)
Total Beban Perjalanan Dinas		14.360.485.622	22.645.414.992	(8.284.929.370)	(36,59)

Penurunan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar 36,59% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Penurunan Beban Perjalanan Dinas disebabkan, antara lain:

1. Beban Perjalanan Dinas Biasa turun sebesar Rp2.824.003.621 atau 28,84% karena berkurangnya kegiatan perjalanan dinas dan audit.
2. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota turun sebesar Rp1.142.069.025 atau 48,45% karena berkurangnya kegiatan konsinyering.
3. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota turun sebesar Rp3.433.954.755 atau 66,89% karena berkurangnya kegiatan koordinasi dan sosialisasi.

D.6 Beban Perjalanan Dinas (lanjutan)

4. Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri naik sebesar Rp1.357.571.754 atau 28,40% karena berkurangnya kegiatan koordinasi dan event di luar negeri.

Kenaikan Beban Perjalanan Dinas disebabkan, antara lain:

1. Beban Perjalanan Dnas Dalam Kota naik sebesar Rp89.250.000 atau 17,79% karena meningkatnya kegiatan audit di dalam kota.
2. Beban Perjalanan Biasa – Luar Negeri naik sebesar Rp383.419.758 atau 472,28% karena meningkatnya kegiatan koordinasi dan undangan dari luar negeri.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp29.133.067.053

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp29.133.067.053 dan Rp38.644.362.187.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan dalam Tabel 38.

Tabel 38
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	21.569.402.016	28.633.673.391	(7.064.271.375)	(24,67)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.403.597.143	4.304.440.664	99.156.479	2,30
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18.745.250	18.745.250	-	-
591313	Beban Penyusutan Jaringan	2.854.666	2.854.666	-	-
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.853.750	9.707.500	(4.853.750)	(50,00)
592115	Beban Amortisasi Software	1.292.674.279	4.121.308.888	(2.828.634.609)	(68,63)
592116	Beban Amortisasi Lisensi	1.840.939.949	1.553.631.828	287.308.121	18,49
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi		29.133.067.053	38.644.362.187	(9.511.295.134)	(24,61)

Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi disebabkan oleh penurunan beban amortisasi Software dimana secara pencatatannya mengalami perbaikan dan sebagian dicatat ke lisensi.

Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.064.271.375 atau 24,67% dikarenakan habisnya masa penyusutan sebagian besar aset.
2. Beban Amortisasi Software sebesar Rp2.828.634.609 atau 68,63% dikarenakan habisnya masa penyusutan software.

*Pendapatan Pelepasan Aset
Non Lancar Rp95.349.346*

D.8 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp95.349.346 dan Rp988.496.967. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp95.349.346 merupakan hasil lelang dari aset yang tidak digunakan lagi di dalam operasional pemerintah.

*Beban Pelepasan Aset Non
Lancar Rp1.381.151.284*

D.9 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang timbul dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.381.151.284 dan Rp1.874.626.873. Beban tersebut berasal dari penghapusan puing.

*Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp40.001.214*

D.10 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan dari Kegiatan Non laporan operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp40.001.214 dan Rp318.297.041.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, terdiri dari:

1. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp5.
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp12.931.366 yang berasal dari pengembalian uang makan PNS dan tunjangan khusus.
3. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp10.064.383 yang berasal dari pengembalian perjalanan dinas.
4. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp16.605.960.
5. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp399.500.

*Beban dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp42.908.000*

D.11 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp42.908.000 dan Rp4.017.518. beban tersebut merupakan kerugian selisih kurs untuk transaksi yang dibayarkan dalam mata uang asing.

Surplus (Defisit) dari Kegiatan
Non Operasional (LO)
(Rp1.288.708.724)

D.12 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (LO)

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (LO) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp1.288.708.724) dan (Rp571.850.383).

Surplus/Defisit Laporan Operasi
(Rp289.035.261.262)

D.13 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar (Rp289.035.261.262) dan (Rp270.519.547.909). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp519.297.103.369

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp519.297.103.369 dan Rp490.854.198.651.

Surplus(defisit) LO
(Rp289.035.261.262)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar (Rp289.035.261.262) dan (Rp270.519.547.909). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi yang
Menambah/Mengurangi Ekuitas
(Rp21.999.600)

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp21.999.600) dan (Rp668.070.625).

Transaksi Antar Entitas
Rp271.368.418.922

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain. Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp271.368.418.922 dan Rp299.630.523.252. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan pada Tabel 39.

E.4. Transaksi Antar Entitas (lanjutan)

Tabel 39
Rincian Transaksi Antar Entitas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	266.404.815.683	295.324.440.555	(28.919.624.872)	(9,79)
313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.428.909.261)	(1.691.517.303)	262.608.042	(15,52)
313211	Transfer Keluar	-	-	-	-
313221	Transfer Masuk	-	-	-	-
391131	Pengesahan Hibah Langsung	6.392.512.500	5.997.600.000	394.912.500	-
Total Transaksi Antar Entitas		271.368.418.922	299.630.523.252	(28.262.104.330)	(9,43)

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp266.404.815.683

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp266.404.815.683 dan Rp295.324.440.555. Ditagihkan ke entitas lain, antara lain Pembayaran Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan, Jasa Laundry, Pembayaran Honorarium Pengajar, Pembelian Keperluan Sehari-Hari Perkantoran, Pengadaan Jasa Hygiene Service dan Pest Control, Pembelian Suku Cadang Perbaikan Elevator, Pengadaan Peralatan Zoom, Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur, dan Pengadaan Persediaan Obat Klinik.

Diterima dari Entitas Lain
(Rp1.428.909.261)

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp1.428.909.261) dan (Rp1.691.517.303).

Diterima dari Entitas Lain Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp1.428.909.261), berasal dari:

1. Satker 453374 sebesar (Rp976.791.126) terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.565.346 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan di Satker 453374.
 - b. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp88.810.000 atas sewa ruangan oleh Kopersi Juanda Tiga Lima untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dibayarkan sekaligus di muka pada satker 453374 dan sewa ATM.
 - c. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp5 atas sisa pembayaran kerugian negara terkait tuntutan ganti rugi laptop BMN.
 - d. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp12.738.848 di satker 453374.

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain (lanjutan)

- e. Pendapatan denda lainnya sebesar Rp747.975.000 berupa denda administratif kepada pihak pelapor sebanyak 31 pihak pelapor.
 - f. Penerimaan Kembali Belanja pegawai TAYL sebesar Rp12.812.366 dari pihak ketiga sebagai pengembalian belanja tunjangan beras, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, uang lembur, dan uang makan pada tahun sebelumnya.
 - g. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp22.889.561 dari pihak ketiga sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran honor narasumber, pembayaran kontrak dan penihilan RPATA tahun anggaran 2023.
2. Satker 417654 sebesar (Rp452.118.135) terdiri dari:
- a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp3.784.000.
 - b. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp114.800.000.
 - c. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp332.880.000.
 - d. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp535.135.
 - e. Pendapatan Penerimaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp119.000.

Ekuitas Akhir
Rp501.608.261.429

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp501.608.261.429 dan Rp519.297.103.369.

5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1 Hibah yang Diterima

Sampai dengan 31 Desember 2024, PPATK telah menerima hibah berupa Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan mesin sebesar Rp6.024.012.500 yang berasal dari:

1. Berita Acara Serah Terima nomor PERJ-06/PL.02.09/PPATKIIIXJ2024 tanggal 20 September berupa Peralatan dan Mesin yang terdiri dari meubelair dan barang seni sebesar Rp1.411.132.200.
2. Berita Acara Serah Terima nomor PERJ-04/PL.02.09/PPATKIIIXJ2024 tanggal 20 September berupa Gedung dan bangunan yang terdiri dari renovasi Gedung lantai 1 dan 4 sebesar Rp4.981.380.300.

F.2 Tuntutan Hukum

Sampai dengan 31 Desember 2024, PPATK tidak memiliki tuntutan hukum yang berdampak pada penyerahan aset atau timbulnya kewajiban.

Tabel 40
Daftar Tuntutan Hukum
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

No	Uraian	Keterangan	Putusan
-Tidak Ada-			

F.3 Capaian Output Strategis

Sampai dengan 31 Desember 2024, output strategis yang telah dicapai PPATK dalam program Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme sebagai berikut:

- b. 474 Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor korupsi, fiskal, dan pemberian informasi yang bekerjasama dengan APGAKUM.
- c. 346 Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, lingkungan hidup, dan tindak pidana lain, serta dugaan tindak pidana terorisme yang bekerjasama dengan APGAKUM, DJBC dan DJP.
- d. 541 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif
- e. 661 Personel APGAKUM telah menerima pelatihan di bidang TPPU dan TPPT.

Tabel 41
Rincian Output Strategis
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Output
1	02.BCE.001	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi	1.500.000.000	1.492.559.374	99,50%	340	474	139%
2	01.BCE.002	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme	1.105.000.000	1.096.954.438	99,27%	275	346	126%
3	01.BCE.003	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif	748.650.000	743.223.983	99,28%	342	541	158%
4	01.SCF.002	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1.902.616.000	1.878.828.635	98,75%	650	661	102%

F.4 Capaian Output per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada PPATK (BA078) dapat diklasifikasikan ke dalam 1 fungsi yaitu Pelayanan Umum (01), Rincian capaian output per fungsi APBN dijelaskan pada tabel 42.

Tabel 42
Rincian Output
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

No	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume	Realisasi Volume	Satuan	%
1	Layanan BMN	40.404.000,00	39.885.057,00	98,72%	5	5	Laporan	100,00%
2	Layanan Hubungan Masyarakat	404.318.000,00	380.086.059,00	94,01%	1	1	Layanan	100,00%
3	Layanan Protokol	977.348.000,00	914.475.940,00	93,57%	1	1	Layanan	100,00%
4	Layanan Umum	144.856.000,00	136.104.428,00	93,96%	1	1	Layanan	100,00%
5	Layanan Perkantoran	22.066.930.000,00	22.059.424.598,00	99,97%	1	1	Layanan	100,00%
6	Layanan Penyelenggaraan kearsipan	88.173.000,00	88.133.534,00	99,96%	1	1	Dokumen	100,00%
7	Layanan perkantoran	160.833.579.000,00	160.828.066.937,00	0,00%	1	1	Layanan	100,00%
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	169.887.000,00	99.209.735,00	58,40%	3	3	Dokumen	100,00%
9	Layanan Manajemen Keuangan	50.739.000,00	46.729.425,00	92,10%	2	2	Dokumen	100,00%
10	Layanan Reformasi Kinerja	13.449.000,00	13.164.547,00	97,88%	3	3	Dokumen	100,00%
11	Layanan organisasi dan tata kelola internal	42.860.000,00	42.458.825,00	99,06%	15	15	Dokumen	100,00%
12	Layanan Manajemen SDM	683.634.000,00	673.896.525,00	98,58%	1	1	Layanan	100,00%
13	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2.555.355.000,00	2.547.215.545,00	99,68%	285	318	Orang	100,00%
14	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi	1.500.000.000,00	1.492.559.374,00	99,50%	340	474	Perkara	100,00%
15	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme	1.105.000.000,00	1.096.954.438,00	99,27%	275	346	Perkara	100,00%
16	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif	748.650.000,00	743.223.983,00	99,28%	342	541	Perkara	100,00%
17	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Jasa Keuangan	303.216.000,00	303.122.135,00	99,97%	25	26	Laporan	100,00%
18	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan	119.665.000,00	119.622.284,00	99,96%	200	222	Lembaga	100,00%
19	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	546.780.000,00	546.383.986,00	99,93%	107	120	Laporan	100,00%
20	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	100.763.000,00	100.752.670,00	99,99%	550	670	Lembaga	100,00%

F.4 Capaian Output per Fungsi APBN (lanjutan)

Tabel 42 (lanjutan)
Rincian Output
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

No	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume	Realisasi Volume	Satuan	%
21	Dokumen Financial Integrity Rating	1.721.739.000,00	1.716.184.314,00	99,68%	6		Rekomendasi	100,00%
22	Pengelolaan Pihak Pelapor	60.625.000,00	55.843.888,00	92,11%	1000	1722	Lembaga	100,00%
23	Evaluasi Kualitas Data Pihak Pelapor	69.234.000,00	69.069.707,00	99,76%	140	168	Lembaga	100,00%
24	Dokumen Ketentuan Kebijakan di Bidang Pelaporan	1.112.714.000,00	1.112.333.625,00	99,97%	33	33	Dokumen	100,00%
	Pemantauan Tindak Lanjut Dukungan							
25	Perkara PPATK	342.954.000,00	342.528.802,00	99,88%	10	12	Perkara	100,00%
26	Kerjasama Dalam Negeri	333.482.000,00	328.845.928,00	98,61%	13	16	Dokumen	100,00%
	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan							
27	Penilaian Kepatuhan Indonesia	574.563.000,00	496.576.245,00	86,43%	3	3	Dokumen	100,00%
28	Penyusunan Dokumen NRA dan SRA	491.074.000,00	480.741.177,00	97,90%	4	5	Kajian	100,00%
29	Kerjasama Luar Negeri	3.993.186.000,00	3.873.678.711,00	97,01%	18	21	Dokumen	100,00%
	Penyusunan Dokumen RRA							
30	Penyusunan Dokumen RRA	69.717.000,00	69.632.000,00	99,88%	1	1	Rekomendasi	100,00%
31	Penyusunan Legislasi	197.611.000,00	179.374.410,00	90,77%	19	22	Kebijakan	100,00%
	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan							
32	Hukum dan HAM	282.437.000,00	281.770.151,00	99,76%	30	42	Peraturan	100,00%
33	Pemberian Penanganan Bantuan Hukum	454.467.000,00	453.866.698,00	99,87%	149	180	Rekomendasi	100,00%
34	Layanan Audit Internal	236.111.000,00	234.309.647,00	99,24%	77	104	Kebijakan	100,00%
35	OM Sarana Teknologi Informasi	33.991.178.000,00	33.932.228.972,00	99,83%	53	62	Laporan	100,00%
	Penyusunan Indeks Efektivitas							
36	Penyusunan Indeks Efektivitas	875.246.000,00	875.001.307,00	0,00%	1	1	Unit	100,00%
37	Komunikasi Publik	498.936.000,00	494.020.599,00	99,01%	1	1	Rekomendasi	100,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor							
38	Pelapor	786.814.000,00	783.263.912,00	99,55%	1040	1258	Layanan	100,00%
39	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1.902.616.000,00	1.878.828.635,00	98,75%	650	661	Orang	100,00%
40	Layanan Perkantoran (Keuangan)	16.367.955.000,00	16.338.011.238,00	99,82%	1	1	Orang	100,00%
41	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9.515.000,00	9.400.400,00	98,80%	3	3	Layanan	100,00%
42	Layanan Manajemen Keuangan	9.746.000,00	9.656.000,00	99,08%	2	2	Dokumen	100,00%
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							
43	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	35.660.000,00	34.706.210,00	97,33%	7	7	Laporan	100,00%
44	Layanan Manajemen SDM	13.433.000,00	13.376.500,00	99,58%	1	1	Layanan	100,00%
45	Layanan Umum	56.703.000,00	55.497.350,00	97,87%	1	1	Layanan	100,00%
46	Layanan Perkantoran (Biro Umum)	8.162.929.000,00	8.155.062.583,00	99,90%	1	1	Layanan	100,00%
47	Layanan Sarana Internal	364.561.000,00	364.341.800,00	99,94%	12	15	Layanan	100,00%
48	Layanan Prasarana Internal	1.696.559.000,00	1.673.095.053,00	98,62%	3	1	Unit	33,33%

F.5 Program Prioritas Nasional

Dalam Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada PPATK untuk Satuan Kerja Pusdiklat APUPPT terdapat alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya diantaranya melalui satu program prioritas, satu kegiatan prioritas, yang berada di satu Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp1.902.615.000 dan realisasi sebesar Rp1.878.828.638 atau 98,75% dengan rincian dijelaskan dalam Tabel 43.

F.5 Program Prioritas Nasional (lanjutan)

Tabel 43
Rincian Program/Kegiatan Prioritas Nasional
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Pusdiklat APU PPT	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme/Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK bagi Aparat Penegak Hukum	1.902.615.000	1.878.828.638	98,75	Orang	650	661	101,69

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Pusdiklat APU PPT memiliki Prioritas Nasional pada tahun 2023, yaitu target peserta Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum Tahun 2024 sejumlah 650 orang peserta. Realisasi pencapaian output dari Prioritas Nasional sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sejumlah 661 orang peserta. Rincian Target dan Realisasi Pelatihan bagi Apgakum dijelaskan dalam Tabel 45.

Tabel 44
Rincian Target dan Realisasi Pelatihan bagi Apgakum
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Diklat bagi APGAKUM	Metode	Perencanaan		Realisasi	
				Total Peserta	Asal Instansi Peserta	Total Peserta	Asal Instansi Peserta
1	20-22 Feb 2024	Penyidikan TPPU Lanjutan (Penundaan dari Tahun 2023)	Tatap Muka	30	Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU, Hakim	26	BNN, DIP, DJBC, PPATK, Kejaksaan Agung, KPK, Tipideksus Bareksrim Polri, Tipikor Bareskrim Polri
2	22 Feb-1 Mar 2024	Pelatihan Teknis Lanjutan Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	Tatap Muka	40	Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU, Hakim	40	BNN & PPATK

F.5 Program Prioritas Nasional (lanjutan)

Tabel 44 (lanjutan)
Rincian Target dan Realisasi Pelatihan bagi Apgakum
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Diklat bagi APGAKUM	Metode	Perencanaan		Realisasi	
				Total Peserta	Asal Instansi Peserta	Total Peserta	Asal Instansi Peserta
3	4-7 Mar 2024	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Sulawesi Selatan	Tatap Muka	50	Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU, Hakim	51	1. Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan 2. Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan 3. Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan 4. Polrestabes Makassar 5. Polres Maros 6. Polres Gowa 7. Polres Takalar 8. Aspidsum Kejati Sulawesi Selatan 9. Aspidsum Kejati Sulawesi Selatan 10. Kejari Makassar 11. Kejari Maros 12. Kejari Gowa 13. Kejari Takalar 14. Penyidik/PPNS pada Badan Narkotika Propinsi Sulawesi Selatan 15. PPNS pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara 16. PPNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan 17. PPNS pada BPOM Makassar 18. PPNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
4	1-28 Mar 2024	E Learning Penelusuran Aset	Mandiri	50	Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU	69	KPK, ESDM, POLDA METRO DKI JAKARTA, POLDA JABAR, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi JATIM, PPNS BNNP DKI JAKARTA, PPNS BNNP JABAR
5	13-17 May 2024	Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim batch 1	Tatap Muka	30	Hakim	29	1. Mahkamah Agung 2. Pengadilan Negeri Karawang 3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 4. Pengadilan Negeri Bandung 5. Pengadilan Negeri Ciamis 6. Pengadilan Negeri Jakarta Timur 7. Pengadilan Negeri Sukabumi 8. Pengadilan Negeri Cianjur 9. Pengadilan Negeri Cikarang 10. Pengadilan Negeri Jakarta Utara 11. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 12. Pengadilan Negeri Bogor 13. Pengadilan Negeri Sumedang 14. Pengadilan Negeri Depok 15. Pengadilan Negeri Bale Bandung
6	28-31 May 2024	Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim batch II	Tatap Muka	30	Hakim	26	1. Pengadilan Negeri Banjar 2. Pengadilan Negeri Bekasi 3. Pengadilan Negeri Bogor 4. Pengadilan Negeri Cianjur 5. Pengadilan Negeri Cibadak 6. Pengadilan Negeri Cibinong 7. Pengadilan Negeri Depok 8. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A 9. Pengadilan Negeri Karawang 10. Pengadilan Negeri Majalengka 11. Pengadilan Negeri Purwakarta 12. Pengadilan Negeri Serang 13. Pengadilan Negeri Sukabumi 14. Pengadilan Negeri Sumber 15. Pengadilan Negeri Sumedang 16. Pengadilan Negeri Tasikmalaya 17. Pengadilan Negeri Ciamis 18. Pengadilan Negeri Tangerang 19. Mahkamah Agung RI
7	4-7 Jun 2024	Penanganan TPPT	Tatap Muka	50	Penyidik Polri (densus 88), Jaksa Penuntut Umum, BNPT	27	1. BNPT 2. Densus 88 AT Dir Intel 3. Densus 88 AT Dir Penyidikan 4. Kejaksaan 5. BAIS TNI 6. PPATK
8	3-28 Jun 2024	E Learning Penelusuran Aset	Mandiri	35	Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU	44	1. KKP 2. BP MIGAS 3. POLDA SUMUT 4. POLDA JATENG 5. POLDA BALI 6. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 7. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 8. Kejaksaan Tinggi Bali 9. BNN SUMUT 10. BNN JATENG 11. BNN BALI
9	18-28 Jun 2024	Penyidikan TPPU Batch I (Mix Penyidik)	Tatap Muka	30	Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU, Hakim	32	1. Ditreskrimsus PMJ 2. Ditresnarkoba PMJ 3. Direkrimsus PMJ 4. Ditreskrimsus Polda Jabar 5. Ditresnarkoba Polda Jabar 6. Ditreskrimsus Polda Jabar 7. Ditreskrimsus Polda Banten 8. Ditresnarkoba Polda Banten 9. Ditreskrimsus Polda Banten 10. Kejati Jakarta 11. Kejati Banten 12. Kejati Jabar 14. DJP 15. DJBC 16. PPATK

F.5 Program Prioritas Nasional (lanjutan)

Tabel 44 (lanjutan)
Rincian Target dan Realisasi Pelatihan bagi Apgakum
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Diklat bagi APGAKUM	Metode	Perencanaan		Realisasi	
				Total Peserta	Asal Instansi Peserta	Total Peserta	Asal Instansi Peserta
10	24 - 27 Juni 2024	Penanganan TPPU dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Tatap Muka	40	Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU, Hakim	38	1. BP2MI 2. TIPIDUM Bareskrim 3. JAMPIDUM Kejaksaan 4. PPATK
11	13 - 23 Agustus 2024	Penyidikan TPPU batch II (KLHK)	Tatap Muka	35	KLHK, Kejaksaan Agung PPATK	31	1. KLHK 2. Kejaksaan Agung (Jampidum) 3. Polri (Tipidter) 4. PPATK
12	10 - 13 September 2024	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Kalimantan Barat	Tatap Muka	45	Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU	46	1. Polres wilayah Kalbar 2. Kejati wilayah Kalbar 3. BNN wilayah Kalbar 4. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar 5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Wilayah Kalbar 6. BBPOM Wilayah Kalbar 7. PSDKP Wilayah Kalbar 8. KLHK Wilayah Kalbar
13	17 - 20 September 2024	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Riau	Tatap Muka	45	Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU	48	1. Polres wilayah Riau 2. Kejati Riau 3. BNN Wilayah Riau 4. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Riau 5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Wilayah Riau 6. BBPOM Wilayah Riau 7. PSDKP Wilayah Riau 8. KLHK Wilayah Riau
14	24 September - 2 Oktober 2024	Penyidikan TPPU dari TP Kelautan dan Perikanan	Tatap Muka	30	KKP,Kejagung (Jampidsus), Bareskrim (Tipidter), PPATK	27	1. KKP 2. Kejagung (Jampidsus) 3. Bareskrim (Tipidter) 4. PPATK
15	15 - 23 Oktober 2024	Penyidikan TPPU dari TP Obat dan Makanan	Tatap Muka	30	BPOM, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK	31	1. BPOM 2. Kejaksaan Agung (Jampidum) 3. Polda Metrojaya 4. PPATK
16	22 - 25 Oktober 2024	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Sumatera Selatan	Tatap Muka	50	Kejaksaan Agung, Polri, PPNS yang memiliki kewenangan menyidik TPPU	62	1. Kejaksaan Negeri Pagar Alam 2. Kejaksaan Negeri Prabumulih 3. Kementerian LHK 4. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 5. Polres Lubuk Linggau 6. Polres Muara Enim 7. Polres Musi Rawas Utara 8. Polres Ogan Komering Ulu 9. Polres Ogan Komering Ulu Selatan 10. Polres Pagar Alam 11. Polres Prabumulih 12. Polrestaes Palembang 13. Satwas SDKP Palembang - Ditjen PSDKP 14. BBPOM Palembang 15. BNN Provinsi Sumatera Selatan 16. DJBC 17. Kanwil DJP Sum-Sel dan Kep. Babel 18. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
17	5 - 7 November 2024	Aset Kripto	Tatap Muka	30	1. PolriPenyidik (Tipid Narkoba)Dentasemen Khusus (Densus) (Penyidik) 2. Kejaksaan Agung (Jampidum) 3. KPKPenyidik 4. BNN (PPNS) 5. DJPPPPNS 6. DJBC (PPNS) 7. OJK 8. PPATK (PJK 1, ASA 6, DP 1, PBJ 2)	34	1. PolriDentasemen Khusus (Densus), 2. Kejaksaan Agung 3. KPK 4. DJP 5. DJBC 6. OJK 7. PPATK
Total Peserta				650	Total Peserta	661	Total Peserta

Jakarta, 7 Mei 2025

Kepala PPATK,



Ivan Yustiavandana

Audited

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN BA 078

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telepon +6221-3850455 +6221-3853922

Faksimili +6221-3856809 +6221-3856826

Website : www.ppatk.go.id

A
Neraca Percobaan Tingkat Kementerian/Lembaga
Per 31 Desember 2024

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



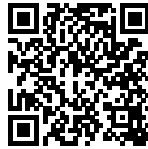
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	266,404,815,683
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,428,909,261	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	91,565,346
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,784,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	88,810,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	114,800,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	332,880,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	5
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	13,273,983
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	747,975,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	12,931,366
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	22,889,561
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,454,568,880	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	288,313	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	13,564
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,132,205,376	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	318,329,585	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	964,580,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,107,500
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,867,061,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	8,331,160
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	219,122,657	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	964,561,980	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	160,000
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,030,695,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	925,000
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	320,950,000	0
3.0	511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1,204,458,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	285,987,400	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,894,028,600	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	62,584	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	352
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	235,918,740	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	56,460,104	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	590,838,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	209,728,320	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	490,182,000	0
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	41,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	512111	Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap	0	623,880
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	2,553,369,845	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	247,895,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	46,782,000	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	65,449,000
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	122,523,888,273	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	16,554,116,518	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	96,725
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,643,289,668	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	250,621,004	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,496,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	431,386,423	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,598,978,258	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	255,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	386,900,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,791,248,724	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	75,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,542,055,432	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	270,265,661	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	5,343,056,009	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	159,482,341	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	148,456,525	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,531,179,901	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	2,769,879,610	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,815,818,055	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	891,355,120	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	1,560,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	5,983,515,998	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,842,691,723	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	444,655,018	0
3.1	523113	Pengembalian Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	0	60,159,992
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31,071,717,857	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	4,949,019,357	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	13,836,484
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,961,249,104	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	340,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	591,360,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,215,235,260	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,720,008,091	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	464,604,258	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	3,445,705,940	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar	0	23,500,547
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364,341,800	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,667,695,053	0
3.1	533113	Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	500,000
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	5,400,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	19,969,522	0
JUMLAH			268,011,625,148	268,011,625,148

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	12,228,109,622	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	136,500,000	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,263,761,136	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	398,119,852
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	28,765,713
0.0	117111	Barang Konsumsi	714,112,421	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	35,191,564	0
0.0	117114	Suku Cadang	102,928,062	0
0.0	117131	Bahan Baku	3,049,200	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	67,929,227	0
0.0	131111	Tanah	235,898,373,342	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	228,394,757,642	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	235,461,247,464	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	149,962,000	0
0.0	134113	Jaringan	85,640,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,108,869,890	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,669,142,180	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	189,354,123,325
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	36,194,359,548
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	140,589,375
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	21,409,995
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	61,382,500
0.0	162151	Software	28,238,445,140	0
0.0	162161	Lisensi	20,072,899,520	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	48,015,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	2,034,144,609	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	303,600,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	303,600,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	26,615,601,094
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	3,403,194,787
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	6,844,125,180
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	942,276,439
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	2,034,144,609
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	66,724,173
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	266,404,815,683
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,428,909,261	0
0.0	391111	Ekuitas	0	519,297,103,369
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	21,999,600	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	6,392,512,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	91,565,346
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,784,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	31,051,244
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	114,800,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	332,880,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	5
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	13,273,983
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	2,017,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	12,931,366
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	10,064,383
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	16,605,960
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	399,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	19,454,870,980	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	274,752	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,132,220,166	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	318,332,543	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	962,472,500	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,862,489,840	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	219,231,644	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	964,561,980	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,034,525,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	320,210,000	0
3.0	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	1,204,458,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	285,987,400	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	3,894,028,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	62,232	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	235,918,740	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	56,460,104	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	590,838,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	209,728,320	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	709,362,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	2,552,745,965	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	247,895,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	46,782,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	127,533,133,342	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	17,088,499,971	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5,643,192,943	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	250,621,004	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20,496,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	431,386,423	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,598,978,258	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	386,645,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,768,848,924	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	75,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	5,555,622,583	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	162,310,897	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	152,449,525	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,523,794,879	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	2,769,879,610	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,815,818,055	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	889,795,120	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	5,983,515,998	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,842,691,723	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	384,495,026	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,829,257,640	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	4,923,953,757	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6,967,652,620	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	591,020,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,215,235,260	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,699,768,091	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	464,604,258	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	3,422,205,393	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	21,569,402,016	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,403,597,143	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18,745,250	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,854,666	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4,853,750	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,292,674,279	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	1,840,939,949	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,708,228,810	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	305,633,563	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	73,024,375	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	9,527,460	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	318,217,586	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	399,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	398,119,852	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	15,411,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,381,151,284	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	836,940	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	41,671,560	0
JUMLAH			1,061,147,203,929	1,061,147,203,929

Keterangan :
FINAL

B
Neraca Tingkat Kementerian/Lembaga
Per 31 Desember 2024 dan 2023

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak 07/05/25 9:28 PM
Halaman 1
lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	12,228,109,622	4,494,720,138	7,733,389,484	172.05
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	136,500,000	11,886,118	124,613,882	1,048.40
Piutang Bukan Pajak	1,263,761,136	28,765,713	1,234,995,423	4,293.29
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(426,885,565)	(28,765,713)	(398,119,852)	1,384.01
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	836,875,571	0	836,875,571	0.00
Persediaan	923,210,474	1,503,958,315	(580,747,841)	(38.61)
JUMLAH ASET LANCAR	14,124,695,667	6,010,564,571	8,114,131,096	135.00
ASET TETAP				
Tanah	235,898,373,342	235,898,373,342	0	0.00
Peralatan dan Mesin	228,394,757,642	231,682,791,394	(3,288,033,752)	(1.42)
Gedung dan Bangunan	235,461,247,464	231,903,803,902	3,557,443,562	1.53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	235,602,000	235,602,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,108,869,890	720,400,368	388,469,522	53.92
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,669,142,180	99,017,550	1,570,124,630	1,585.70
AKUMULASI PENYUSUTAN	(225,771,864,743)	(204,486,875,429)	(21,284,989,314)	10.41
JUMLAH ASET TETAP	476,996,127,775	496,053,113,127	(19,056,985,352)	(3.84)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	48,359,359,660	44,857,359,660	3,502,000,000	7.81
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	2,034,144,609	900,470,326	1,133,674,283	125.90
Aset Lain-lain	303,600,000	5,088,200,711	(4,784,600,711)	(94.03)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(30,322,395,881)	(31,973,382,364)	1,650,986,483	(5.16)
JUMLAH ASET LAINNYA	20,374,708,388	18,872,648,333	1,502,060,055	7.96
JUMLAH ASET	511,495,531,830	520,936,326,031	(9,440,794,201)	(1.81)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	9,820,546,228	1,630,257,245	8,190,288,983	502.39
Pendapatan Diterima Dimuka	66,724,173	8,965,417	57,758,756	644.24
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9,887,270,401	1,639,222,662	8,248,047,739	503.17
JUMLAH KEWAJIBAN	9,887,270,401	1,639,222,662	8,248,047,739	503.17
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	501,608,261,429	519,297,103,369	(17,688,841,940)	(3.41)
JUMLAH EKUITAS	501,608,261,429	519,297,103,369	(17,688,841,940)	(3.41)
JUMLAH EKUITAS	501,608,261,429	519,297,103,369	(17,688,841,940)	(3.41)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	511,495,531,830	520,936,326,031	(9,440,794,201)	(1.81)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak 07/05/25 9:28 PM
Halaman 2
lap_neraca_kl_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

C

Laporan Operasional Tingkat Kementerian/Lembaga
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM

Halaman : 1

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,509,005,227	389,026,871	2,119,978,356	544.944
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,509,005,227	389,026,871	2,119,978,356	544.944
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,509,005,227	389,026,871	2,119,978,356	544.944
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	183,925,089,079	146,524,787,576	37,400,301,503	25.525
Beban Persediaan	2,035,973,856	3,094,813,449	(1,058,839,593)	(34.213)
Beban Barang dan Jasa	33,043,766,219	35,797,317,056	(2,753,550,837)	(7.692)
Beban Pemeliharaan	27,359,056,084	23,630,029,137	3,729,026,947	15.781
Beban Perjalanan Dinas	14,360,485,622	22,645,414,992	(8,284,929,370)	(36.585)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM

Halaman : 2

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	29,133,067,053	38,644,362,187	(9,511,295,134)	(24.612)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	398,119,852	0	398,119,852	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	290,255,557,765	270,336,724,397	19,918,833,368	7.368
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(287,746,552,538)	(269,947,697,526)	(17,798,855,012)	6.593
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(1,285,801,938)	(886,129,906)	(399,672,032)	45.103
Pendapatan Pelepasan Aset	95,349,346	988,496,967	(893,147,621)	(90.354)
Beban Pelepasan Aset	1,381,151,284	1,874,626,873	(493,475,589)	(26.324)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(2,906,786)	314,279,523	(317,186,309)	(100.925)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	40,001,214	318,297,041	(278,295,827)	(87.433)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	42,908,000	4,017,518	38,890,482	968.023
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1,288,708,724)	(571,850,383)	(716,858,341)	125.358
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(289,035,261,262)	(270,519,547,909)	(18,515,713,353)	6.845
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(289,035,261,262)	(270,519,547,909)	(18,515,713,353)	6.845

Keterangan :

FINAL

D
Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Kementerian/Lembaga
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2024

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM

Halaman : 1

lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	519,297,103,369	490,854,198,651	28,442,904,718	5.79
SURPLUS/DEFISIT-LO	(289,035,261,262)	(270,519,547,909)	(18,515,713,353)	6.84
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(21,999,600)	(668,070,625)	646,071,025	(96.71)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(21,999,600)	(631,842,999)	609,843,399	(96.52)
LAIN-LAIN	0	(36,227,626)	36,227,626	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	271,368,418,922	299,630,523,252	(28,262,104,330)	(9.43)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(17,688,841,940)	28,442,904,718	(46,131,746,658)	(162.19)
EKUITAS AKHIR	501,608,261,429	519,297,103,369	(17,688,841,940)	(3.41)

Keterangan :

FINAL

E
Laporan Realisasi Anggaran Tingkat
Kementerian/Lembaga untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 078

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	225,173,000	1,428,909,261	1,203,736,261	634.58	0	1,691,517,303	1,691,517,303	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	225,173,000	1,428,909,261	1,203,736,261	634.58	0	1,691,517,303	1,691,517,303	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	225,173,000	1,428,909,261	1,203,736,261	634.58	0	1,691,517,303	1,691,517,303	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	267,207,371,000	266,404,815,683	(802,555,317)	99.70	295,106,419,000	295,324,440,555	218,021,555	100.07
1. Belanja Pegawai	177,201,534,000	177,088,426,719	(113,107,281)	99.94	146,125,064,000	146,522,906,500	397,842,500	100.27
2. Belanja Barang	87,924,717,000	87,259,482,589	(665,234,411)	99.24	99,290,090,000	99,117,426,538	(172,663,462)	99.83
3. Belanja Modal	2,081,120,000	2,056,906,375	(24,213,625)	98.84	49,691,265,000	49,684,107,517	(7,157,483)	99.99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 078

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:28 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	267,207,371,000	266,404,815,683	(802,555,317)	99.70	295,106,419,000	295,324,440,555	218,021,555	100.07
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

F
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat
Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja Untuk Periode
yang Berakhir 31 Desember 2024**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 9:29 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	17,698,714,000	19,454,572,000	19,454,568,880	0	19,454,568,880	100	3,120
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	470,000	441,000	288,313	13,564	274,749	65.38	166,251
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,072,459,000	1,132,205,000	1,132,205,376	0	1,132,205,376	100	624
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	289,092,000	318,341,000	318,329,585	0	318,329,585	100	11,415
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	995,326,000	964,580,000	964,580,000	2,107,500	962,472,500	100	2,107,500
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,601,398,000	2,867,061,000	2,867,061,000	8,331,160	2,858,729,840	100	8,331,160
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	57,856,000	219,124,000	219,122,657	0	219,122,657	100	1,343
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	898,154,000	964,763,000	964,561,980	0	964,561,980	99.98	201,020
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,060,891,000	2,037,872,000	2,030,695,000	160,000	2,030,535,000	99.65	7,337,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	258,020,000	320,950,000	320,950,000	925,000	320,025,000	100	925,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	26,932,380,000	28,279,910,000	28,272,362,791	11,537,224	28,260,825,567	99.97	19,084,433
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1,200,268,000	1,204,458,000	1,204,458,000	0	1,204,458,000	100	0
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	283,382,000	285,988,000	285,987,400	0	285,987,400	100	600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,483,650,000	1,490,446,000	1,490,445,400	0	1,490,445,400	100	600
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,102,237,000	3,894,032,000	3,894,028,600	0	3,894,028,600	100	3,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	85,000	104,000	62,584	352	62,232	60.18	41,768
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	133,423,000	235,920,000	235,918,740	0	235,918,740	100	1,260
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	33,010,000	56,461,000	56,460,104	0	56,460,104	100	896
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	313,598,000	590,838,000	590,838,000	0	590,838,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	119,495,000	209,729,000	209,728,320	0	209,728,320	100	680
511628	Belanja Uang Makan PPPK	453,960,000	494,960,000	490,182,000	41,000	490,141,000	99.03	4,819,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	3,155,808,000	5,482,044,000	5,477,218,348	41,352	5,477,176,996	99.91	4,867,004
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	5,014,156,000	2,558,778,000	2,553,369,845	623,880	2,552,745,965	99.79	6,032,035
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	5,014,156,000	2,558,778,000	2,553,369,845	623,880	2,552,745,965	99.79	6,032,035
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	477,458,000	247,970,000	247,895,000	0	247,895,000	99.97	75,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	44,563,000	46,879,000	46,782,000	0	46,782,000	99.79	97,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	522,021,000	294,849,000	294,677,000	0	294,677,000	99.94	172,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	96,156,882,000	122,525,085,000	122,523,888,273	65,449,000	122,458,439,273	100	66,645,727

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 9:29 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,104,012,000	16,570,422,000	16,554,116,518	0	16,554,116,518	99.9	16,305,482
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	103,260,894,000	139,095,507,000	139,078,004,791	65,449,000	139,012,555,791	99.99	82,951,209
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	140,368,909,000	177,201,534,000	177,166,078,175	77,651,456	177,088,426,719	99.98	113,107,281
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,355,256,000	5,644,053,000	5,643,289,668	96,725	5,643,192,943	99.99	860,057
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	166,500,000	250,632,000	250,621,004	0	250,621,004	100	10,996
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	36,840,000	20,510,000	20,496,000	0	20,496,000	99.93	14,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	421,734,000	434,520,000	431,386,423	0	431,386,423	99.28	3,133,577
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	4,980,330,000	6,349,715,000	6,345,793,095	96,725	6,345,696,370	99.94	4,018,630
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,112,112,000	2,642,624,000	2,598,978,258	0	2,598,978,258	98.35	43,645,742
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	776,100,000	391,918,000	386,900,000	255,000	386,645,000	98.72	5,273,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,003,044,000	1,791,267,000	1,791,248,724	0	1,791,248,724	100	18,276
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,891,256,000	4,900,809,000	4,852,126,982	255,000	4,851,871,982	99.01	48,937,018
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,563,047,000	1,544,321,000	1,542,055,432	0	1,542,055,432	99.85	2,265,568
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	258,869,000	270,270,000	270,265,661	0	270,265,661	100	4,339
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,821,916,000	1,814,591,000	1,812,321,093	0	1,812,321,093	99.87	2,269,907
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	5,031,600,000	5,343,058,000	5,343,056,009	0	5,343,056,009	100	1,991
522112	Belanja Langganan Telepon	183,400,000	159,663,000	159,482,341	0	159,482,341	99.89	180,659
522113	Belanja Langganan Air	75,600,000	148,482,000	148,456,525	0	148,456,525	99.98	25,475
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,802,745,000	3,531,943,000	3,531,179,901	0	3,531,179,901	99.98	763,099
522131	Belanja Jasa Konsultan	3,396,971,000	2,772,304,000	2,769,879,610	0	2,769,879,610	99.91	2,424,390
522141	Belanja Sewa	3,210,109,000	2,818,064,000	2,815,818,055	0	2,815,818,055	99.92	2,245,945
522151	Belanja Jasa Profesi	1,784,100,000	917,954,000	891,355,120	1,560,000	889,795,120	97.1	28,158,880
522191	Belanja Jasa Lainnya	7,060,631,000	5,984,446,000	5,983,515,998	0	5,983,515,998	99.98	930,002
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	24,545,156,000	21,675,914,000	21,642,743,559	1,560,000	21,641,183,559	99.85	34,730,441
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,845,215,000	1,843,939,000	1,842,691,723	0	1,842,691,723	99.93	1,247,277
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	476,100,000	444,656,000	444,655,018	60,159,992	384,495,026	100	60,160,974
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31,560,449,000	31,082,986,000	31,071,717,857	0	31,071,717,857	99.96	11,268,143
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	4,838,500,000	4,949,020,000	4,949,019,357	0	4,949,019,357	100	643

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 9:29 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	38,720,264,000	38,320,601,000	38,308,083,955	60,159,992	38,247,923,963	99.97	72,677,037
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,587,679,000	6,980,043,000	6,961,249,104	13,836,484	6,947,412,620	99.73	32,630,380
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	650,980,000	649,847,000	591,360,000	340,000	591,020,000	91	58,827,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,119,848,000	1,383,001,000	1,215,235,260	0	1,215,235,260	87.87	167,765,740
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,564,926,000	1,840,541,000	1,720,008,091	0	1,720,008,091	93.45	120,532,909
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	15,923,433,000	10,853,432,000	10,487,852,455	14,176,484	10,473,675,971	96.63	379,756,029
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	117,577,000	464,614,000	464,604,258	0	464,604,258	100	9,742
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	4,906,265,000	3,545,041,000	3,445,705,940	23,500,547	3,422,205,393	97.2	122,835,607
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	5,023,842,000	4,009,655,000	3,910,310,198	23,500,547	3,886,809,651	97.52	122,845,349
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	97,906,197,000	87,924,717,000	87,359,231,337	99,748,748	87,259,482,589	99.36	665,234,411
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,806,100,000	364,561,000	364,341,800	0	364,341,800	99.94	219,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,806,100,000	364,561,000	364,341,800	0	364,341,800	99.94	219,200
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1,691,159,000	1,667,695,053	0	1,667,695,053	98.61	23,463,947
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	5,400,000	5,400,000	500,000	4,900,000	100	500,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,925,450,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,925,450,000	1,696,559,000	1,673,095,053	500,000	1,672,595,053	98.62	23,963,947
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	762,970,000	20,000,000	19,969,522	0	19,969,522	99.85	30,478
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	762,970,000	20,000,000	19,969,522	0	19,969,522	99.85	30,478
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,494,520,000	2,081,120,000	2,057,406,375	500,000	2,056,906,375	98.86	24,213,625
	JUMLAH BELANJA	243,769,626,000	267,207,371,000	266,582,715,887	177,900,204	266,404,815,683	99.77	802,555,317

G
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat
Kementerian/Lembaga Menurut Sumber Dana/Program/
Kegiatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 9:29 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme							
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	4,075,000,000	2,689,430,000	2,662,092,547	12,948,054	2,649,144,493	98.5	40,285,507
3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK	2,457,000,000	934,515,000	915,011,259	0	915,011,259	97.91	19,503,741
3380	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	9,359,200,000	7,179,158,000	6,961,024,769	23,500,547	6,937,524,222	96.63	241,633,778
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	35,661,535,000	33,991,178,000	33,932,228,972	430,000	33,931,798,972	99.83	59,379,028
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	5,875,000,000	4,034,736,000	4,023,312,609	0	4,023,312,609	99.72	11,423,391
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	4,450,000,000	3,353,650,000	3,332,737,795	753,430	3,331,984,365	99.35	21,665,635
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BE	61,877,735,000	52,182,667,000	51,826,407,951	37,632,031	51,788,775,920	99.317	393,891,080
WA	Program Dukungan Manajemen							
3374	Pengawasan Internal PPATK	300,000,000	236,111,000	234,309,647	0	234,309,647	99.24	1,801,353
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	141,124,605,000	177,454,870,000	177,344,238,282	77,951,456	177,266,286,826	199.7	188,583,174
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Ppatk	4,424,460,000	3,330,942,000	3,311,653,605	1,560,000	3,310,093,605	197.34	20,848,395
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK	36,042,826,000	34,002,781,000	33,866,106,402	60,756,717	33,805,349,685	198.99	197,431,315
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	181,891,891,000	215,024,704,000	214,756,307,936	140,268,173	214,616,039,763	99.875	408,664,237
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	243,769,626,000	267,207,371,000	266,582,715,887	177,900,204	266,404,815,683	99.766	802,555,317
	JUMLAH	243,769,626,000	267,207,371,000	266,582,715,887	177,900,204	266,404,815,683	99.77	802,555,317

H
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat
Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2024**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 078

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 07/05/25 9:29 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	91,565,346	0	91,565,346	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,784,000	0	3,784,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19,973,000	88,810,000	0	88,810,000	444.65
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	114,800,000	0	114,800,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	19,973,000	298,959,346	0	298,959,346	1,496.82
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	205,200,000	332,880,000	0	332,880,000	162.22
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	205,200,000	332,880,000	0	332,880,000	162.22
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	5	0	5	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	5	0	5	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	13,273,983	0	13,273,983	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	747,975,000	0	747,975,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	761,248,983	0	761,248,983	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,931,366	0	12,931,366	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	22,889,561	0	22,889,561	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	35,820,927	0	35,820,927	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	225,173,000	1,428,909,261	0	1,428,909,261	634.58
	JUMLAH PENDAPATAN	225,173,000	1,428,909,261	0	1,428,909,261	634.58

I

Daftar Rekening Pemerintah

DAFTAR REKENING PEMERINTAH

No.	Kantor/Satuan Kerja	Kementerian Negara/Lembaga	kode BA - Es. I - Satker	Jenis Rekening (Giro/Deposito)	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-453374 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Giro	1190000909018 (Rek Induk)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gambir
2	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-453374 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Giro	8100124533741000	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Bank Mandiri, KC. Jkt Plaza Mandiri
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-417654- Pusdiklat APUPPT	Giro	1330026731364 (Rek Induk)	BPN 023 PUSDIKLAT APU DAN PP TERORIS	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	Bank Mandiri, KCP. Mayor Oking
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-417654- Pusdiklat APUPPT	Giro	8100124176541000	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	Bank Mandiri, KC. Jkt Plaza Mandiri

J
**Kas di Bendahara Pengeluaran,
Kas Lainnya, dan Setara Kas**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Nama Akun	31 Desember 2024		Keterangan	31 Desember 2023		Keterangan
			Jumlah	Tunai/No Rek		Jumlah	Tunai/No Rek	
1	-	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	-	-	-	-	-
2	-	Pusat Pendidikan dan Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Nama Akun	31 Desember 2024		Keterangan	31 Desember 2023		Keterangan
			Jumlah	Tunai/No Rek		Jumlah	Tunai/No Rek	
1	453374	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	-	-	-	-	-
2	417654	Pusat Pendidikan dan Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-



K
**Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Unit Badan Lainnya yang kami pimpin merupakan bagian dari Keuangan Negara, baik yang mendapatkan dana dari APBN maupun non APBN, sehingga kami wajib melaporkan seluruh sumber daya dan realisasi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab kami kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pimpinan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

Ikhtisar Laporan Keuangan Komite TPPU Tahun 2024 *Audited* telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang ada di Satuan Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Strategi Nasional.

Jakarta, 29 April 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Alberd T.B. Sianipar



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (KOMITE TPPU) TAHUN 2024 AUDITED

Dasar Hukum

1. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komite TPPU.

Tugas Komite TPPU

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, Komite TPPU bertugas untuk mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Fungsi Komite TPPU

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
4. Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Keanggotaan Komite TPPU

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2016, susunan Keanggotaan Komite TPPU, yaitu :

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Komite TPPU



Ikhtisar Laporan Keuangan

- Sekretaris : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Intelijen Negara;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
13. Kepala Badan Narkotika Nasional.

Informasi Keuangan

Kegiatan Komite TPPU dibebankan pada DIPA PPATK Nomor DIPA-078.01.1.453374/2024 tanggal 28 November 2023 dalam Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia – Pelaksanaan Kegiatan Strategi Nasional (3380.AEC.00.052)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
DANA APBN/NON APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Kegiatan/Output : 3380/002											
NO	NAMA UBL	ALOKASI APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	BA	KETERANGAN
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3-8)	10	11	12
1	Komite PP TPPU	514.063.000	-	496.576.245	-	-	496.576.245	17.486.755	-	078	
	A. Koordinasi melalui Komite KKN PP-TPPU TPPU	514.063.000	-	496.576.245	-	-	496.576.245	17.486.755	-		
	Belanja Bahan	92.911.000	-	87.270.220	-	-	87.270.220	5.640.780	-		
	Belanja Honor Output Kegiatan	23.125.000	-	18.200.000	-	-	18.200.000	4.925.000	-		
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	104.712.000	-	104.711.025	-	-	104.711.025	975	-		
	Belanja Sewa	6.990.000	-	6.990.000	-	-	6.990.000	-	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.620.000	-	12.750.000	-	-	12.750.000	870.000	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	272.705.000	-	266.655.000	-	-	266.655.000	6.050.000	-		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
DANA APBN/NON APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA UBL	ALOKASI APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	BA	KETERANGAN
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3-8)	10	11	12
1	Komite PP TPPU	514.063.000	-	496.576.245	-	-	496.576.245	17.486.755	-	078	Kode Kegiatan/ Output : 3380.AEC.002. 052

Komite TPPU



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA UBL	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (6+7)	9 = (5-9)	11	11
1	Komite PP TPPU	-	-	-	496.576.245	-	496.576.245	(496.576.245)	078	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA UBL	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)	8	9	10 = (8+9)	11	12 = (10+11)	11	11
1	Komite PP TPPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078	

Jakarta, 29 April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Alberd T.B. Sianipar
NRP 71110417

Komite TPPU

